

**DINASTI POLITIK DI TINGKAT DESA: STUDI
KASUS DOMINASI DINASTI ATMA WIJAYA PADA
KEPEMIMPINAN DESA SINDANGWANGI,
KABUPATEN BREBES**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Disusun Oleh:

Ridwan Maulana

2106016117

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi/ Proposal Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi/ skripsi saudara/i:

Nama : Ridwan Maulana

NIM : 2106016117

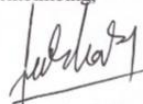
Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Dinasti Politik di Tingkat Desa: Studi Kasus Dominasi Dinasti Atma Wijaya Pada Kepemimpinan Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Oktober 2024
Pembimbing,



Muhammad Mahsun M.A.
NIP. 19851118201601190

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dinasti politik di Tingkat Desa: Studi Kasus Dominasi Dinasti Atma Wijaya
Pada Kepemimpinan Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes

Disusun oleh :

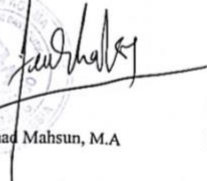
Ridwan Maulana

2106016117

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada Senin, 24 Maret 2025 dan
telah dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji :

Ketua



Muhammad Mahsun, M.A

Sekretaris



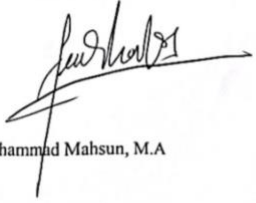
Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si

Penguji



Drs. H.Nur Syamsudin, M.A

Pembimbing



Muhammad Mahsun, M.A

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Ridwan Maulana menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Dinasti politik di Tingkat Desa: Studi Kasus Dominasi Dinasti Atma Wijaya Pada Kepemimpinan Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 14 Maret 2025

Yang Menyatakan



Ridwan Maulana

2106016117

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT sudah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis bisa selesaikan skripsi berjudul “Dinasti Politik di Tingkat Desa: Studi Kasus Dominasi Dinasti Atma Wijaya Pada Kepemimpinan Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes”. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan pada Rasulullah SAW sudah berikan syafaatnya pada kita semua, sehingga bisa jadi umat yang memiliki akhlakul karimah.

Dengan selesainya skripsi ini yakni pencapaian luas biasa buat penulis serta menjadi hasil akhir semasa ikuti proses perkuliahan dan sebagai syarat guna peroleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis sadari pada proses pembelajaran serta penyusunan skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, serta kasih sayang dari berbagai pihak. Rasa syukur saya persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu menjadi penyemangat dan menjadi alasan aku kuat, terima kasih pada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M.Ag., yang sudah berikan kesempatan pada penulis buat mengenyam pendidikan serta selesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag., yang sudah berikan berbagai ilmu, arahan, serta nasehat semasa penulis mengenyam pendidikan di jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M. Si., serta ibu Marohatun, M, Si., sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sudah berikan dukungan, arahan, serta berbagai ilmu pada penulis semasa perkuliahan.
4. Dosen Pembimbing yang terbaik, Bapak Muhammad Mahsun, M.A., yang telah sabar dalam membimbing, beri masukan, arahan, memotivasi, serta luangkan waktu, tenaga, pikiran pada penulis. Sehingga, penulis bisa selesaikan skripsi ini dengan lancar.

5. Dosen Wali penulis, Moh. Yamin Darsyah, M.Si., yang senantiasa memberikan motivasi selama perwalian.
6. Bapak/Ibu Dosen, serta segenap jajaran civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya, membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis dan telah memberikan izin serta berbagai informasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan lancar.
8. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Irfan Fauzi serta Ibu Siti Maesaroh, terima kasih telah memberikan doa, pengorbanan, semangat, dukungan berupa moral dan materi kepada penulis. Terima kasih sudah berjuang untuk merawat dan membesarkan saya dengan penuh rasa cinta, kehangatan, dan kasih sayang sehingga penulis dapat berada di posisi saat ini. Semoga bapak dan ibu tercinta selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dapat menemani selamanya.
9. Teman istimewa NPM yang telah menemani dan memberikan dukungan bagi penulis sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Penghuni grup WA SigmaBoy, Terima kasih atas ketulusan yang diberikan dalam pertemanan ini dan semangat yang sudah diberikan kepada penulis. Semoga ikatan pertemanan ini dapat terus terjalin selamanya dan sukses untuk kalian semua.
11. Terakhir, untuk diri saya sendiri Ridwan Maulana, terima kasih sudah berusaha dan berjuang sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya sebab telah bertanggung jawab buat selesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih sudah bertahan serta tidak menyerah ini merupakan awal untuk kesuksesan yang akan datang.

Apabila masih banyak kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, demi jadikan skripsi ini lebih baik serta bermanfaat bagi pembaca, penulis sangat membutuhkan kritik, ide, serta

masukannya yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan do'a dan rasa syukur atas rahmat serta hidayah
pada Allah SWT

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta saya Bapak Irfan Fauzi serta Ibu Siti Maesaroh sudah tulus membesarkan saya dengan kasih sayang tanpa batas, yang senantiasa melangitkan doa – doanya untuk kesuksesan anak- anaknya, yang selalu memberikan kehangatan disetiap hari , yang selalu berusaha dan ikhlas demi memberikan semua yang dibutuhkan anak- anaknya, terimakasih bapak dan ibu telah mempercayai dan mensuport anakmu sampai dititik ini.

MOTTO

“Human clock is always in a rush, but God’s clock is always on time”

(Prof. Mykhailo Mudryk)

Abstrak

Fenomena dinasti politik di tingkat desa menjadi isu yang menarik dalam kajian politik lokal Indonesia, khususnya terkait dengan keberlanjutan kekuasaan dalam satu keluarga. Penelitian ini berfokus pada dinasti politik Atma Wijaya di Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes yang telah berlangsung selama tiga generasi sejak tahun 1933. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis proses terbentuknya dinasti politik tersebut serta dampaknya terhadap proses demokrasi di desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana proses terbentuknya dinasti politik Atma Wijaya dalam kepemimpinan Desa Sindangwangi serta bagaimana dampak dominasi dinasti tersebut terhadap proses demokrasi di desa tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Historical Institutionalism* yang menyoroti bagaimana faktor sejarah dan kelembagaan membentuk pola politik dinasti, serta Teori Politik Kekerabatan yang menjelaskan bagaimana jaringan keluarga dan patronase berkontribusi terhadap pelanggaran kekuasaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, keluarga Atma Wijaya, dan warga desa, serta melalui analisis dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik Atma Wijaya memiliki kontrol dominan dalam pemilihan kepala desa serta jabatan strategis pemerintahan desa melalui politik uang dan hubungan kekerabatan. Hal ini menyebabkan proses demokrasi di Desa Sindangwangi menjadi tidak kompetitif dan menghambat regenerasi kepemimpinan. Studi ini menegaskan bahwa dinasti politik di tingkat desa dapat melemahkan prinsip demokrasi partisipatif serta memperkuat oligarki lokal. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk membatasi dominasi politik dinasti dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Kata Kunci: Dinasti Politik, Demokrasi Desa, Kepemimpinan Desa, Patron-Klien, Desa Sindangwangi.

Abstract

The phenomenon of political dynasties at the village level is an interesting issue in the study of Indonesian local politics, especially in relation to the continuation of power in one family. This research focuses on the Atma Wijaya political dynasty in Sindangwangi Village, Brebes Regency, which has lasted for three generations since 1933. The main objective of this research is to analyze the process of the formation of the political dynasty and its impact on the democratic process in the village. To achieve these objectives, this research formulates two main questions, namely how the process of forming the Atma Wijaya political dynasty in the leadership of Sindangwangi Village and how the impact of the dynasty's dominance on the democratic process in the village.

This research uses a qualitative approach with a case study method. The theory used in this research is Historical Institutionalism which highlights how historical and institutional factors shape dynastic political patterns, as well as *Kinship* Political Theory which explains how family networks and patronage contribute to the perpetuation of power. Data was collected through in-depth interviews with community leaders, the Atma Wijaya family, and villagers, as well as through analysis of relevant documents.

The results show that the Atma Wijaya political dynasty has dominant control over the election of the village head and strategic village government positions through money politics and the *kinship* relationships. This causes the democratic process in Sindangwangi Village to become uncompetitive and inhibits leadership regeneration. This study confirms that political dynasties at the village level can undermine the principles of participatory democracy and strengthen local oligarchies. Therefore, stricter regulations are needed to limit the dominance of dynastic politics and encourage wider community participation.

Keywords: Political Dynasty, Village Democracy, Village Leadership, Patron-Client, Sindangwangi Village.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Dinasti Politik Tingkat Desa	7
2. Kepemimpinan Desa	9
F. Metodologi Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sumber dan Jenis Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II <i>HISTORICAL INSTITUTIONALISM</i> DAN POLITIK KEKERABATAN: ACUAN METODOLOGIS DAN KERANGKA TEORI	12

A. Definisi Konseptual	12
1. Dinasti Politik	18
2. Dominasi	18
3. Kepemimpinan Desa	20
4. Proses Demokrasi Desa	20
B. Kerangka Teori	16
1. <i>Historical Institutionalism</i>	16
2. Teori Politik Kekerabatan.....	26
BAB III LANSKAP DESA SINDANGWANGI	30
A. Gambaran Umum Desa Sindangwangi.....	30
1. Sejarah Desa Sindangwangi	30
2. Geografis Desa Sindangwangi	32
3. Kondisi Demografis Desa Sindangwangi	33
4. Struktur Politik dan Pemerintahan Desa Sindangwangi	35
5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Desa sindangwangi.....	37
6. Dinamika Politik Desa Sindangwangi.....	41
B. Profil Dinasti Atma Wijaya.....	44
1. Munculnya Dinasti Atma Wijaya.....	44
2. Silsilah Keluarga Atma Wijaya	46
3. Jaringan Kekerabatan Atma Wijaya.....	47
4. Sumber Kekuatan Keluarga Atma Wijaya	48
BAB IV PROSES TERBENTUKNYA DINASTI POLITIK ATMA WIJAYA DALAM KEPEMIMPINAN DESA SINDANGWANGI KABUPATEN BREBES.....	51
A. Proses Awal Terbentuknya Dinasti Politik Atma Wijaya	52
1. Sejarah Awal Keterlibatan Keluarga Atma Wijaya dalam Politik Desa	52
2. Motivasi Awal Pembentukan Dinasti Atma Wijaya	54
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Dinasti Politik .	56
1. Peran Institusi Desa dalam Membentuk Dominasi Politik.....	56
2. Pengaruh Budaya dan <i>Kinship</i> dalam Politik Desa	58
3. Kepentingan Ekonomi dan Modal Sosial	60
C. Langkah-Langkah Penguatan Kekuasaan oleh Dinasti Atma Wijaya	

.....	61
1. Strategi Politik Keluarga	61
2. Peran Anggota Keluarga dalam Struktur Pemerintahan Desa	63
3. Pengelolaan Konflik oleh Keluarga Atma Wijaya	65
D. Dinamika Dalam Mempertahankan Kekuasaan	66
1. Respon Masyarakat Terhadap Dinasti Politik	66
2. Penyesuaian Strategi Dinasti dalam Menghadapi Tantangan Politik dan Sosial	69
BAB V DAMPAK DOMINASI DINASTI POLITIK ATMA WIJAYA TERHADAP PROSES DEMOKRASI DI DESA SINDANGWANGI KABUPATEN BREBES	71
A. Karakteristik Dominasi Dinasti Atma Wijaya.....	73
1. Strategi Sosial dan Politik	73
2. Peran Institusi dalam Politik Desa	75
3. Peran <i>Kinship</i> dalam Struktur Politik Desa	76
B. Dampak Dominasi Keluarga Atma Wijaya Terhadap Proses Demokrasi Desa.....	78
1. Sentralisasi Kekuasaan dan Demokrasi Formal/Prosedural.....	78
2. Interaksi Antara Kepentingan dan Institusi	81
3. Fleksibilitas dalam Struktur Sosial	83
4. Demokrasi Semu di Desa Sindangwangi	84
5. Resistensi Perubahan Dinasti Politik di Desa Sindangwangi	86
C. Manipulasi Kebijakan untuk Mempertahankan Kekuasaan	88
1. Pemanfaatan Institusi dan Regulasi Desa	88
2. Institutional Lock-In di Desa Sindangwangi	90
BAB VI PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Urutan Jabatan Kepala Desa Sindangwangi dari Awal Sampai Sekarang, Beserta Periode Menjabat dan Status Keluarga	2
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Desa Sindangwangi.....	33
Tabel 3.2 Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Sindangwangi.....	34
Tabel 3.3 Urutan Jabatan Kepala Desa Sindangwangi dari Awal Sampai Sekarang, Beserta Periode Menjabat dan Status Keluarga	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Sindangwangi.....	32
Gambar 3.2 Struktur Pemerintahan Desa Sindangwangi	35
Gambar 3.3 Presentase Pekerjaan Masyarakat Desa Sindangwangi	37
Gambar 3.4 Kondisi Pertanian Desa Sindangwangi.....	38
Gambar 3.5 Silsilah Keluarga Atma Wijaya	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena dinasti politik menjadi salah satu isu menarik dalam konteks politik lokal di Indonesia, terutama dalam kepemimpinan di tingkat desa. Salah satu contoh nyata adalah dinasti politik Atma Wijaya di Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes. Dinasti ini mencerminkan kekuatan politik yang terpusat dalam satu keluarga serta menggambarkan peran sejarah dan institusi dalam membentuk dinamika kekuasaan di tingkat lokal. Keberadaan dinasti ini relevan untuk diteliti, mengingat pengaruhnya terhadap sistem demokrasi dan partisipasi masyarakat di desa tersebut.

Dalam berbagai penelitian sebelumnya tentang dinasti politik, fenomena ini merujuk pada kemunculan calon dari lingkaran keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa, atau berasal dari anggota keluarga maupun kerabat dekatnya (Bimantara, 2018). Dinasti politik terjadi ketika kekuasaan atau pemerintahan dikuasai oleh sejumlah kecil orang yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan, dan orang-orang tersebut menempati posisi strategis di lembaga-lembaga politik (Suyadi, 2014). Fenomena dinasti Politik ditandai dengan partisipasi suami, istri, anak, saudara, atau kerabat petahana dalam dunia politik, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pengisian jabatan-jabatan strategis (Rusnaedi, 2020).

Sebenarnya praktik dinasti politik di tingkat desa itu sangat banyak, akan tetapi sangat sedikit penelitiannya. Biasanya mayoritas peneliti hanya tertarik dengan isu dinasti politik dari tingkat kabupaten sampai nasional saja, contoh yang paling terkenal adalah dinasti politik Ratu Atut Chosiyah dari Banten (Agustino, 2010) dan dinasti politik di Kabupaten Kuningan yang dipimpin oleh Aang Hamid Suganda (Fadiyah et al., 2022). Walaupun penelitian dinasti politik di tingkat desa terbilang sedikit, tetapi ada salah satu fenomena dinasti politik dari Desa Saring Sungai Binjai, di mana kekuasaan diwariskan melalui hubungan keluarga, terutama oleh keluarga Anafson Hadi (Zuhriyati et al., 2021).

Studi yang saya lakukan ini mengkaji secara mendalam bagaimana praktik dinasti politik ini bekerja. Kajian ini dilakukan di Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes, saya mengambil latar penelitian di Desa Sindangwangi karena desa ini mempunyai sejarah dinasti yang sangat menarik. Dimana dominasi politik keluarga Atma Wijaya yang telah memegang kendali atas kepemimpinan desa selama tiga generasi dari tahun 1933 hingga sekarang. Keluarga Atma Wijaya tidak hanya berada dalam lingkaran kepala desa saja, tetapi banyak jabatan-jabatan struktural seperti Sekertaris desa, Kaur desa, dan kadus. Studi ini berusaha untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya, dengan kajian ini yang berfokus pada proses terbentuknya dinasti politik di Desa Sindangwangi dan dampaknya terhadap proses demokrasi yang ada di Desa Sindangwangi.

Tabel 1.1 Urutan Jabatan Kepala Desa Sindangwangi dari Awal Sampai Sekarang, Beserta Periode Menjabat dan Status Keluarga

No	Nama	Periode Menjabat	Status
1	Atma Wijaya	1933-1983	Kepala Desa Pertama Desa Sindangwangi
2	Mahyoto	1983-1986	Adik Sepupu Atma Wijaya
3	Mian	1986-1990	Sepupu dari Istri Atma Wijaya
4	Edi Sunarso	1990-1994	Keponakan Atma Wijaya
5	Sudono	1994-2002	Cucu Atma Wijaya
6	Irawati Fatmah	2002-2014 dan 2020- sekarang	Adik Ipar Sudono
7	Daryo	2014-2020	Kakak Sepupu Sudono

Sumber: Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat

Dinasti politik di tingkat desa sering kali menciptakan pola kepemimpinan yang terus berulang di dalam lingkaran keluarga tertentu. Hal ini terlihat dalam kepemimpinan Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes, yang didominasi oleh

keluarga besar Atma Wijaya sejak tahun 1933. Atma Wijaya, yang menjabat sebagai Kepala Desa Sindangwangi pada periode 1933-1983, menjadi pelopor awal terbentuknya dinasti politik di desa tersebut. Sebagai kepala desa pertama dari dinasti ini, kepemimpinan Atma Wijaya tidak hanya meletakkan fondasi bagi pembangunan desa, tetapi juga menandai awal mula pengaruh keluarganya dalam struktur politik desa.

Setelah masa jabatan Atma Wijaya berakhir, kepemimpinan Desa Sindangwangi dilanjutkan oleh Mahyoto, adik sepupunya, yang menjabat dari 1983 hingga 1986. Pergantian ini terjadi karena masalah kesehatan yang dialami oleh Atma Wijaya, tetapi tetap dalam lingkaran keluarga yang erat. Setelah Mahyoto, Mian, sepupu dari istri Atma Wijaya, terpilih menjadi kepala desa pada tahun 1986, bertepatan dengan pemilihan kepala desa (Pilkades) pertama di Sindangwangi. Hal ini semakin mengukuhkan pengaruh keluarga Atma Wijaya dalam politik lokal, di mana kekuasaan terus berpindah dari satu anggota keluarga ke anggota lainnya.

Dominasi dinasti ini berlanjut ketika Edi Sunarso, keponakan Atma Wijaya, menggantikan Mian pada tahun 1990. Penerus berikutnya, Sudono, cucu Atma Wijaya, terpilih dalam Pilkades kedua pada tahun 1994, menguatkan dinasti ini hingga awal 2000-an. Irawati Fatmah, adik ipar Sudono, kemudian mengambil alih kepemimpinan dari 2002 hingga 2014 dan kembali menjabat pada 2020 setelah didukung penuh oleh Sudono. Pola ini juga melibatkan Daryo, kakak sepupu Sudono, yang sempat menjabat antara 2014-2020.

Fenomena penting terjadi pada pemilihan kepala desa tahun 1994, dimana pada saat itu sudah ada empat kandidat calon kepala desa yang mundur setelah mendengar Sudono yang merupakan cucu dari Atma Wijaya mendeklarasikan untuk maju sebagai calon kepala desa. Setelah sudono berkuasa selama delapan tahun, dia mempersiapkan diri untuk melangkah menjadi calon DPRD Kabupaten Brebes dan tahta kepala desa dia serahkan kepada adik iparnya yang bernama Irawati Fatmah. Setelah itu Sudono hanya berperan dibelakang layar sebagai patron, dimana Sudono selalu menjadi pemeran dalam keberhasilan konsolidasi Dinasti Atma Wijaya dalam memenangkan beberapa Pilkades.

Pada Pilkades Sindangwangi 2019, fenomena politik kekerabatan menjadi nyata dengan kembalinya Irawati Fatmah mencalonkan diri setelah dua periode menjabat. Dalam pemilihan yang diikuti oleh empat kandidat lain, Raswa, Daryo, Kamsi, dan Edy Bagol. Irawati Fatmah berhasil meraih kemenangan dengan 2.414 suara dari total 4.231 suara yang dicoblos. Keberhasilannya tidak lepas dari dukungan Sudono, seorang anggota DPRD Kabupaten Brebes sekaligus kakak iparnya yang juga mantan Kepala Desa Sindangwangi. Sudono berperan penting dalam kampanye dengan membiayai politik uang, membagikan amplop melalui keponakannya, Dedi, kepada warga di beberapa dukuh seperti Jetak, Cipancur, Babakan, Sindangwangi Lama, dan Marenggeng. Strategi tersebut efektif mengamankan suara masyarakat, sementara lawan-lawannya hanya memperoleh suara terbatas, Raswa dengan 977 suara, Daryo 480 suara, Kamsi 256 suara, Edy Bagol 78 suara, serta 26 suara rusak. Dari total 5.700 hak pilih di desa tersebut, hanya 4.231 suara yang digunakan akibat tingginya jumlah perantau, sehingga tingkat partisipasi pemilih mencapai 74,22%. Dengan hasil akhir yang menunjukkan Irawati Fatmah meraih 57,05% suara, disusul Raswa 23,09%, Daryo 11,34%, Kamsi 6,05%, Edy Bagol 1,84%, dan suara rusak 0,63%, Pilkades Sindangwangi 2019 mencerminkan partisipasi demokrasi yang cukup tinggi meskipun dipengaruhi oleh kuatnya politik kekerabatan.

Dalam hal ini menandakan jika dinasti politik sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam sistem demokrasi, diharapkan terjadi pergantian kekuasaan dan desentralisasi, sedangkan dinasti politik cenderung memusatkan kekuasaan karena pergantian pemimpin hanya terjadi di lingkup kelompok yang sama (Azzahra & Sukri, 2022). Situasi ini akan membatasi kesempatan bagi masyarakat di luar lingkaran dinasti untuk berpartisipasi, karena calon yang berasal dari keluarga dinasti biasanya memiliki banyak pendukung (Karunia & Sohrah, 2020).

Dengan begitu keluarga Atma Wijaya menjadi semakin jelas dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran demokrasi, dimana tidak adanya transparansi pada setiap kepemimpinan desanya. Situasi ini menjadi semakin bertentangan dengan prinsip demokrasi ketika pemerintah desa tidak pernah melibatkan

masyarakat desa dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa hanya menguntungkan keluarga serta kelompok-kelompok mereka saja, bahkan proyek pembangunannya saja selalu dipegang oleh Rujo selaku adik dari Sudono itu sendiri.

Dinamika kepemimpinan di Desa Sindangwangi menunjukkan adanya dominasi dinasti politik keluarga Atma Wijaya yang telah berlangsung sejak tahun 1933. Keluarga ini memiliki pengaruh yang kuat dalam struktur politik desa, dengan jaringan kekuasaan yang dibangun melalui hubungan kekerabatan dan posisi strategis di perangkat desa. Dukungan suara yang mencapai 50% dari keluarga besar Atma Wijaya semakin mengukuhkan dominasi ini. Masyarakat cenderung memilih pemimpin dari keluarga ini atas dasar kepercayaan dan kedekatan emosional, meskipun terdapat kesadaran akan potensi praktik *money politics*. Selain itu, keterlibatan anggota keluarga dalam perangkat desa memungkinkan mereka untuk memengaruhi partisipasi warga dalam pemilihan kepala desa, sering kali mengarah pada pola pemilihan yang terkontrol.

Dalam konteks Desa Sindangwangi, hubungan kekerabatan keluarga Atma Wijaya berfungsi sebagai mekanisme aliansi strategis yang memperkuat posisi politik melalui dukungan kolektif keluarga besar. Selain itu, aliansi kekerabatan ini didukung oleh fleksibilitas dalam struktur sosial, di mana keluarga mampu memanfaatkan posisi strategis mereka di perangkat desa untuk mempertahankan pengaruh dan mengendalikan proses politik. Tradisi pernikahan atau hubungan antar-keluarga yang erat juga membantu memperluas jaringan kekuasaan mereka.

Kajian ini berfokus pada analisis fenomena dinasti politik di Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes. Studi ini akan mengupas bagaimana dinasti politik terbentuk, beroperasi, dan mempertahankan kekuasaannya dalam konteks kepemimpinan desa. Dengan mempelajari kasus keluarga Atma Wijaya yang telah mendominasi kepemimpinan desa selama lebih dari tiga generasi, penelitian ini akan mengkaji berbagai faktor yang mendukung keberlangsungan dinasti tersebut, termasuk jaringan kekuasaan, strategi politik, dan peran kekerabatan dalam memperkuat pengaruh politik lokal.

Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dampak dinasti politik terhadap dinamika demokrasi di tingkat lokal. Kajian ini menyoroti bagaimana konsolidasi kekuasaan dalam satu keluarga dapat membatasi partisipasi politik dan regenerasi kepemimpinan di desa. Dalam konteks ini, proses demokrasi desa semakin dipengaruhi oleh kebijakan eksternal dari pemerintah pusat yang membuat Pilkades bersifat prosedural dan lebih menyerupai sistem demokrasi negara modern. Akibatnya, otonomi desa berkurang, diiringi maraknya praktik *money politics* dan ketidaknetralan perangkat desa. Pelanggaran-pelanggaran ini, yang sering kali tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas, menunjukkan bahwa meskipun formalitas demokrasi desa tetap dijalankan, nilai asli dari demokrasi dan otonomi desa semakin pudar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh politik kekerabatan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta dampaknya terhadap pembangunan desa dan kualitas demokrasi di Indonesia secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses terbentuknya dinasti politik Atma Wijaya dalam kepemimpinan Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana dampak dominasi Atma Wijaya terhadap proses demokrasi di Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses terbentuknya dinasti politik Atma Wijaya dalam kepemimpinan Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengidentifikasi dampak dominasi dinasti politik Atma Wijaya terhadap proses demokrasi di Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua jenis, yakni manfaat teoritis dan manfaat penelitian praktis.

1. Manfaat Teoretis

Pada kajian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan memperkaya pengetahuan akademis.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pembaca

Peningkatan pemahaman Pembaca mengenai bagaimana dinasti politik berfungsi di tingkat desa dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Desa Sindangwangi.

b) Bagi Peneliti

Penelitian ini menyediakan data empiris yang bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut mengenai efektivitas pemerintahan desa di bawah dominasi dinasti politik dan bisa digunakan sebagai perbandingan dengan kasus-kasus serupa di daerah lain.

E. Tinjauan Pustaka

Pada Tinjauan ini memberikan pemahaman terkait penelitian terdahulu banyak orang yang meneliti tentang dinasti politik dalam pencarian penulis. Penelitian yang sudah ada dijadikan referensi dan mendukung penelitian yang dilakukan peneliti. Tinjauan pustaka pada penelitian ini terbagi jadi 2 bagian, yang pertama terkait Dinasti Politik di Tingkat desa dan yang kedua terkait Kepemimpinan Desa.

1. Dinasti Politik Tingkat Desa

Fenomena dinasti politik tidak hanya terjadi di tingkat kabupaten/kota, tetapi juga di tingkat desa. Hal ini terbukti dari berbagai tulisan mengenai studi dinasti politik di desa yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian, studi dinasti politik di desa umumnya membahas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dinasti politik.

Modal ekonomi menjadi faktor utama yang mendukung keberlangsungan dinasti politik di desa, seperti Asriani dan Wawan (2021) dalam artikelnya menjelaskan bahwa kemampuan ekonomi seorang kepala desa juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam proses pencalonan. Kekayaan yang dimiliki oleh kepala desa berperan sebagai modal utama untuk mencapai tujuan tertentu (Asriani et al., 2021). Sependapat dengan hal itu, Siregar dkk (2021) dalam artikelnya juga menyebutkan jika bertahannya kepemimpinan petahana disebabkan oleh faktor ekonomi yang mapan dan berasal dari keluarga dengan kondisi keuangan yang sangat baik (Siregar et al., 2021).

Selain itu, modal sosial seperti jaringan keluarga dan hubungan patron-klien memainkan peran penting dalam keberlangsungan dinasti politik di tingkat desa. Seperti yang dijelaskan oleh Lestario (2022) dalam artikelnya menjelaskan bahwa keluarga kepala desa memang memiliki pengaruh yang signifikan di masyarakat. Selain itu, jabatan-jabatan penting di desa, seperti Kas Pemerintahan, Kaur Kesra, RT, dan Kaur Umum, juga sering kali memiliki hubungan kekerabatan (Lestario, 2022). Sejalan dengan itu, menurut Tristana (2017) dalam artikelnya menyebutkan bahwa Eksistensi dinasti politik di desa disebabkan oleh kemampuannya dalam mereproduksi basis sumber daya patronase yang melalui jaringan klientelistik berubah menjadi dukungan politik yang besar dan berkelanjutan. Legitimasi kekuasaannya diperoleh dari kemampuan menjaga soliditas keluarga inti serta dukungan sumber daya patronase, terutama sumber daya ekonomi yang sangat kuat. Selain itu, kemampuan untuk memelihara soliditas eksternal, yang dikenal sebagai jaringan klientelistik, juga berperan penting, karena jaringan tersebut tidak hanya tetap ada tetapi juga cenderung menguat (Tristana, 2017).

Beta (2018) juga menjelaskan pendapat yang serupa dalam artikelnya, hal tersebut menjelaskan bahwa Fenomena dinasti politik menunjukkan bagaimana aktor-aktor desa yang berperan sebagai patron dapat mempengaruhi hasil Pilkadaes bahkan sebelum pemungutan suara dilakukan. Peran sentral ini juga menggambarkan bahwa praktik patronase dan klientelisme masih sangat

umum dalam politik lokal, terutama di pedesaan. Aktor-aktor desa ini biasanya memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan incumbent, yang menjadi fondasi bagi konstelasi politik yang terbentuk. Hubungan kekerabatan tersebut juga menjadi faktor yang memperkuat solidaritas di antara mereka dalam mempertahankan legitimasi, yang telah dirancang jauh sebelum Pilkades dilangsungkan (Beta, 2018).

2. Kepemimpinan Desa

Fathoni dkk (2015) menjelaskan dalam artikelnya bahwa kepemimpinan desa adalah kemampuan mempengaruhi perilaku individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, di mana pemimpin berperan dalam mengarahkan, memotivasi, berkomunikasi, dan mengoordinasi bawahannya. Gaya kepemimpinan yang khas menjadi faktor penting dalam efektivitas pencapaian tujuan, termasuk keberhasilan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat desa juga memegang peran utama dalam menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan tersebut (Fathoni & Rengu, 2015). Sependapat dengan itu, Lamangida dkk (2017) berpendapat jika Kepala Desa berperan penting sebagai motivator, fasilitator, mediator, serta administrator dalam pembangunan desa. Ia bertanggung jawab mendorong partisipasi masyarakat dan memastikan keberhasilan program pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kepala desa yang kompeten, jujur, bijaksana, dan memiliki keterampilan dalam pemerintahan, didukung oleh perangkat desa yang berkualitas (Lamangida et al., 2017).

Gaya pemimpin yang sesuai untuk mewujudkan pembangunan desa yaitu gaya kepemimpinan yang demokratis, humanis, dan gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan (Ismail & Junus, 2019). Sependapat dengan penjelasan tersebut, Bagus dan Sasmito (2021) serta wendari dkk (2021) juga menjelaskan jika Gaya kepemimpinan yang harus diterapkan di desa adalah gaya kepemimpinan yang demokratis. Hal ini ditandai dengan kemampuan Kepala Desa untuk memaksimalkan perannya, seperti sebagai pemecah konflik, pengambil keputusan, penyampai informasi, pemberi pengaruh, dan

pembangun hubungan komunikasi (Bagus & Sasmito, 2021). Dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan, pemimpin desa wajib menerima saran, ide, serta kritik dari bawahannya melalui musyawarah dan komunikasi terbuka yang dilakukan dalam pertemuan rutin atau rapat (Wendari et al., 2021).

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan, studi ini memberikan perspektif baru tentang fenomena dinasti politik di tingkat desa, dengan fokus pada Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung mengeksplorasi dinasti politik di tingkat nasional atau provinsi, studi ini mengalihkan perhatian ke tingkat lokal dan menganalisis bagaimana kekuasaan politik diwariskan dalam keluarga Atma Wijaya selama tiga generasi. Studi ini juga menguraikan secara rinci strategi politik, jaringan kekerabatan, serta dominasi keluarga tersebut yang berdampak pada proses demokrasi di desa, sebuah pendekatan yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian ini. Pertama, keterbatasan fokus lokasi, di mana penelitian hanya meneliti satu desa, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk konteks desa lain di Indonesia. Kedua, keterbatasan waktu, di mana penelitian hanya mencakup perkembangan dinasti politik dalam periode tertentu, tanpa mempertimbangkan dinamika jangka panjang atau perbandingan dengan desa yang mengalami perubahan kekuasaan. Ketiga, pendekatan kualitatif yang digunakan terbatas pada satu studi kasus, sehingga mungkin tidak mencakup variabel eksternal yang dapat memengaruhi dinasti politik di tingkat desa, seperti pengaruh pemerintah pusat atau provinsi.

Studi ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada dinasti politik di tingkat kabupaten atau provinsi, terutama dalam hal modal ekonomi dan jaringan patron-klien. Sebaliknya, penelitian ini menyoroti aspek kekerabatan serta penggunaan politik uang dalam pemilihan kepala desa, dengan analisis yang lebih mendalam mengenai cara dinasti

politik membentuk struktur kekuasaan secara turun-temurun di desa, sebuah topik yang jarang dijelaskan dalam studi terdahulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Studi ini berfokus pada fenomena dinasti politik Atma Wijaya di Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes. Penelitian bertujuan untuk menganalisis proses terbentuknya dinasti politik dalam kepemimpinan desa dan dampaknya terhadap demokrasi lokal. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kekuasaan politik diwariskan dalam keluarga Atma Wijaya selama tiga generasi, serta strategi dan jaringan kekerabatan yang digunakan untuk mempertahankan dominasi mereka.

Metode ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif bertujuan memahami realitas sosial sebagaimana adanya, dengan peneliti sebagai instrumen utama yang harus berpikiran terbuka dan memiliki pengetahuan luas (Mamik, 2018). Pendekatan studi kasus, menurut Creswell (2015), digunakan untuk menggali informasi mendalam dan memahami fenomena kompleks dalam konteks nyata. Pendekatan ini memungkinkan analisis holistik terhadap proses, interaksi, dan dampak dinasti politik di Desa Sindangwangi. Informasi diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, serta mengandalkan informasi langsung dari responden dan informan, seperti masyarakat desa dan pihak terkait (Rahmadi, 2018).

Analisis ini menunjukkan bahwa dominasi dinasti politik Atma Wijaya membatasi partisipasi politik masyarakat, menghambat regenerasi kepemimpinan, dan melemahkan praktik demokrasi. Konsolidasi kekuasaan dalam satu keluarga juga meningkatkan risiko money politics dan ketidaknetralan perangkat desa. Meski memberikan wawasan mendalam,

penelitian ini diakui memiliki keterbatasan, seperti fokus pada satu desa dan tidak mencakup variabel eksternal lain yang dapat memengaruhi dinasti politik di tingkat desa. Secara keseluruhan, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang dinamika politik lokal dan memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam konteks demokrasi dan pemerintahan di Indonesia.

2. Sumber dan Jenis Data

Data primer adalah informasi yang didapat langsung dari sumber utama di lokasi atau objek penelitian. Informasi ini berasal dari sumber-sumber asli yang menyediakan data yang diperlukan. Misalnya, data primer dapat diperoleh dari responden melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. Sebaliknya, data sekunder adalah informasi yang didapat dari sumber kedua yang mengandung data yang relevan. Data ini berasal dari sumber yang bukan asli, tetapi tetap memuat informasi yang penting. Contoh data sekunder termasuk data yang diperoleh dari literatur, laporan penelitian, atau sumber lain yang telah dipublikasikan sebelumnya (Rahmadi, 2018).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari masyarakat, perangkat desa, dan mantan kepala desa yang berada di Desa Sindangwangi, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen terkait praktek dan fenomena dinasti politik di Indonesia serta literatur-literatur terkait yang berguna untuk menunjang penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode untuk memudahkan proses pengumpulan informasi. Dua teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (Interview)

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data terkait dominasi dinasti Atma Wijaya dalam kepemimpinan Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes. Informan kunci dipilih secara purposive

berdasarkan peran dan pengaruhnya dalam dinamika politik desa. Informan yang sudah saya wawancarai terbagi menjadi tiga kategori, yaitu tokoh masyarakat, anggota keluarga Atma Wijaya, dan masyarakat biasa. Dalam kategori tokoh masyarakat, wawancara dilakukan dengan Darto, mantan Ketua Penyelenggara Pilkades untuk menggali perspektif tentang proses demokrasi di tingkat desa serta pengaruh dinasti Atma Wijaya dalam pemilihan kepala desa. Selain itu, Ramidi sebagai mantan Sekretaris Desa diwawancarai untuk memberikan informasi mengenai struktur pemerintahan desa dan keterlibatan keluarga Atma Wijaya dalam tata kelola desa.

Pada kategori keluarga Atma Wijaya, wawancara dilakukan dengan Rujo sebagai calon kepala desa yang mewakili generasi baru dinasti tersebut, Daryo dan Sudono sebagai mantan kepala desa yang memberikan refleksi dan wawasan tentang kepemimpinan mereka. Katijo sebagai kakak dari mantan kepala desa juga memberikan sudut pandang dari tokoh senior dalam keluarga. Selain itu, Sutamto yang merupakan Kepala Dusun Ciheuleut memberikan perspektif dari level pemerintahan desa yang berada di bawah kepemimpinan dinasti Atma Wijaya.

Untuk memahami pandangan masyarakat, wawancara juga dilakukan dengan Suklim, seorang warga yang aktif dalam kegiatan desa, serta Kustoro, seorang warga yang memiliki pandangan kritis terhadap kepemimpinan dinasti ini. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka untuk memfasilitasi eksplorasi data secara mendalam, sehingga setiap informan dapat menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara bebas terkait situasi politik di Desa Sindangwangi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk memahami pola dominasi dinasti Atma Wijaya di tingkat desa.

b. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan mencakup data profil desa Sindangwangi serta foto-foto dengan narasumber untuk membuktikan adanya wawancara yang dilakukan oleh penulis. Metode dokumentasi ini sangat penting bagi peneliti untuk mengumpulkan data dan dokumen pendukung, seperti gambar atau file, guna menarik kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1994) menjelaskan bahwa terdapat tiga kegiatan analisis yang akan terjadi secara bersamaan. Ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data adalah analisis yang menajamkan, mengkategorikan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu agar data dapat disusun sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan fokus pada dominasi Dinasti Atma Wijaya dalam struktur pemerintahan Desa Sindangwangi, meliputi kategorisasi data berdasarkan aspek kunci dari dominasi politik tersebut. Proses ini melibatkan pengarahannya pada peristiwa, tindakan, dan kebijakan spesifik yang mencerminkan kekuatan dan pengaruh Dinasti Atma Wijaya, serta membuang informasi yang tidak relevan untuk menjaga fokus analisis. Dengan menyusun data secara sistematis, peneliti dapat mengidentifikasi pola dominasi yang signifikan dan menarik kesimpulan mendalam tentang bagaimana Dinasti Atma Wijaya membentuk struktur politik di tingkat desa, memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang fenomena dinasti politik lokal.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui visualisasi dan narasi untuk menjelaskan dominasi Dinasti Atma Wijaya. Tabel digunakan untuk memetakan hubungan antara keluarga, aktor politik, kebijakan, dan dampaknya pada struktur sosial dan ekonomi desa. Visualisasi ini membantu menggambarkan pengaruh Dinasti Atma Wijaya terhadap pemerintahan desa dan respon masyarakat. Penyajian data naratif memberikan konteks dan detail tentang pandangan warga desa melalui kutipan wawancara dan analisis dokumen kebijakan. Dengan penyajian data yang jelas, penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang dominasi Dinasti Atma Wijaya dan

memungkinkan pembaca memahami kesimpulan yang ditarik, serta dapat digunakan untuk tujuan akademis dan perumusan kebijakan demokratis di tingkat desa.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman (1994) penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah abstraksi hasil penelitian yang dapat berupa jawaban teoritis maupun empiris terhadap masalah penelitian. Proses ini melibatkan refleksi mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, identifikasi pola dan hubungan, serta abstraksi temuan menjadi jawaban yang koheren tentang dominasi Dinasti Atma Wijaya dalam struktur pemerintahan di Desa Sindangwangi. Verifikasi memastikan kesimpulan didasarkan pada bukti kuat melalui pengujian ulang data, konfirmasi temuan, dan penilaian konsistensi. Kesimpulan memberikan jawaban empiris dan teoritis tentang pengaruh Dinasti Atma Wijaya terhadap dinamika politik dan sosial di Desa Sindangwangi, serta kontribusi pada pemahaman fenomena dinasti politik lokal. Kesimpulan ini juga menawarkan implikasi untuk penelitian lanjut dan kebijakan, mendukung peningkatan demokrasi dan tata kelola desa.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini berguna untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi dan memberikan gambaran yang komprehensif secara garis besar. Untuk itu, skripsi ini dibagi menjadi tujuh bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TEORI HISTORICAL INSTITUTIONALISM DAN POLITIK KEKERABATAN

Penulis memberikan penjelasan terkait teori-teori yang relevan dengan objek pada penelitian ini. Adapun teorinya meliputi teori Teori Historical Institutionalism Sven Steinmo dan Politik Kekerabatan Donald V. Kurtz.

BAB III LANSKAP DESA SINDANGWANGI

Pada bab ini peneliti membahas terkait gambaran umum yang mana pada bab ini membahas Kondisi Geografis Desa Sindangwangi, demografis pendudukan Desa Sindangwangi, Profil Desa Sindangwangi, Visi Misi Desa Sindangwangi, dan Sejarah Desa Sindangwangi.

BAB IV PROSES TERBENTUKNYA DINASTI POLITIK ATMA WIJAYA DALAM KEPEMIMPINAN DESA SINDANGWANGI KABUPATEN BREBES

Pada pembahasan Bab empat peneliti akan menganalisis terkait terbentuknya dinasti politik Atma Wijaya dalam menjadikannya Kepala Desa Sindangwangi sampai saat ini. Bab ini membahas secara rinci proses awal pembentukan dinasti politik Atma Wijaya, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya dan langkah-langkah yang diambil oleh anggota dinasti untuk memperkuat kekuasaannya. Melalui analisis yang mendalam, bab ini mengungkap bagaimana dinasti politik Atma Wijaya berhasil memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya dalam mengendalikan pemerintahan desa.

BAB V DAMPAK DOMINASI DINASTI POLITIK ATMA WIJAYA TERHADAP PROSES DEMOKRASI DI DESA SINDANGWANGI KABUPATEN BREBES

Bab ini membahas dampak dominasi Dinasti Politik Atma Wijaya terhadap proses demokrasi Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes. Analisis tersebut menyoroti implikasi dominasi Dinasti Atma Wijaya terhadap struktur dan proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Bab ini dimulai dengan merangkum karakteristik dominasi Dinasti Atma Wijaya yang meliputi strategi politik yang digunakan, pengaruh sosial dan ekonomi, serta respons masyarakat terhadap dominasi ini. Penelitian memperhatikan cara Dinasti Atma Wijaya memanipulasi kebijakan pemerintahan desa untuk mempertahankan kekuasaannya. Ini termasuk pembahasan tentang bagaimana Dinasti Atma Wijaya memanfaatkan kebijakan

pemerintah untuk memperkuat posisi politiknya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, Bab ini juga menyoroti resistensi dan perlawanan yang muncul dari masyarakat terhadap dominasi Dinasti Atma Wijaya.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga saran atau rekomendasi dari peneliti. Kesimpulan adalah abstraksi hasil penelitian, baik berupa jawaban teoritis maupun empiris terhadap masalah penelitian yang ditentukan. Sedangkan saran atau rekomendasi merupakan masukan atau pandangan dari peneliti untuk berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN

Bab ini berisi daftar sumber referensi yang digunakan untuk penyusunan laporan penelitian. Lampiran berisi data yang diperoleh selama penelitian yang mendukung laporan hasil penelitian. Lampiran data penelitian terdiri dari: surat izin penelitian, dokumen buku profil desa, dan dokumentasi aktivitas yang sesuai dengan penelitian.

BAB II

***HISTORICAL INSTITUTIONALISM* DAN POLITIK KEKERABATAN: ACUAN METODOLOGIS DAN KERANGKA TEORI**

A. Definisi Konseptual

1. Dinasti Politik

Dinasti politik memiliki kecenderungan kekuasaan politik yang diwariskan antar anggota keluarga, di mana posisi politik penting sering kali dipegang oleh keluarga yang sama secara berturut-turut. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa anggota dinasti mungkin kurang memiliki pengalaman publik, mereka sering kali memiliki modal politik lokal yang kuat, yang membantu mereka masuk ke dalam struktur kekuasaan. Hal ini mencerminkan bagaimana kekuasaan politik dapat menjadi warisan turun-temurun, memperkuat dominasi keluarga dalam lingkup politik formal (Bó et al., 2007).

Sejalan dengan ini, Yoes C. Kenawas memandang dinasti politik sebagai monopoli kekuasaan politik oleh keluarga tertentu, terutama di tingkat subnasional dalam masyarakat yang sedang mengalami proses demokratisasi. Kenawas menjelaskan bahwa dinasti politik memungkinkan elit politik mempertahankan dan memperluas kekuasaan melalui hubungan keluarga, dengan memanfaatkan jaringan informal, kekayaan, dan status politik sebagai petahana. Dinasti politik ini memperkuat dominasi mereka dengan memanfaatkan berbagai mekanisme politik untuk terus berkuasa dan memperbesar pengaruhnya. Kedua perspektif ini menyoroti bagaimana dinasti politik dapat menciptakan dan mempertahankan kekuasaan melalui hubungan keluarga, baik dalam konteks sistem politik mapan seperti di AS maupun dalam masyarakat demokratis yang sedang berkembang (Kenawas, 2015).

2. Dominasi

John Scott mendefinisikan dominasi sebagai pengorganisasian kekuasaan dalam struktur yang stabil dan bertahan lama, di mana satu agen

atau kelompok agen mengontrol agen lainnya. Dalam konteks ini, dominasi muncul melalui pengaruh korektif dan persuasif. Pengaruh korektif melibatkan penggunaan sanksi, yang dapat berubah menjadi koersi atau bujukan dalam struktur dominasi. Sebaliknya, pengaruh persuasif menggunakan argumen dan alasan, yang dapat bertransformasi menjadi perintah atau keahlian. Dominasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kontrol "berbasis hukuman" oleh manajer lini dan "birokrasi representatif" oleh manajer staf teknis, yang menciptakan hubungan institusional seperti komitmen, loyalitas, dan kepercayaan (Scott, 2007).

Felicia Pratto, Andrew L. Stewart, dan Fouad Bou Zeineddine memperluas pemahaman ini dengan menghubungkan dominasi ke dalam hierarki kekuasaan dalam masyarakat, di mana kelompok dominan memiliki kekuasaan lebih besar daripada yang lain, menciptakan ketidaksetaraan. Teori mereka menunjukkan bahwa dalam masyarakat dengan surplus sumber daya, struktur kekuasaan cenderung berbentuk hierarki dominasi, yang jarang berubah menjadi organisasi sosial yang lebih setara. Mereka juga menyoroti ketegangan politik sebagai struktur kekuasaan yang lebih tidak stabil dibandingkan dengan hierarki dominasi yang stabil. Teori ini memperlihatkan bagaimana dominasi dapat mempertahankan ketidaksetaraan sosial melalui struktur yang tampaknya kokoh tetapi rentan terhadap dinamika politik (Pratto et al., 2013).

Georges Romme memperdalam konsep dominasi dengan fokus pada distribusi kekuasaan di dalam organisasi, di mana dominasi tidak hanya terbatas pada kontrol langsung tetapi juga melalui mekanisme seperti pengendalian informasi dan struktur hierarkis. Romme menunjukkan bahwa dominasi yang berlebihan dapat menghambat inovasi dan kebebasan dalam organisasi, sehingga penting bagi organisasi untuk mengembangkan struktur yang lebih inklusif dan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi bukan hanya tentang kontrol kekuasaan, tetapi juga memengaruhi interaksi dan dinamika organisasi, serta kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan tumbuh. Dengan demikian, ketiga perspektif ini bersama-sama

mengilustrasikan berbagai manifestasi dominasi dalam struktur sosial dan organisasi, serta dampaknya terhadap keadilan, partisipasi, dan inovasi (Romme, 1999).

3. Kepemimpinan Desa

Lamangida, Akbar, dan Hasan menjelaskan bahwa kepemimpinan desa sangat penting untuk pengembangan dan kemajuan desa, di mana kepala desa berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan mediator dalam menjalankan program dan pembangunan. Kepala desa juga bertindak sebagai administrator yang mengelola pemerintahan, masyarakat, dan pembangunan, yang membutuhkan keterampilan khusus untuk mendorong partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, kepala desa sering kali menghadapi tantangan dari dalam dan luar desa yang harus diatasi untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana (Lamangida et al., 2017).

Lebih lanjut, menurut Fathoni, Suryadi, dan Rengu berpendapat jika keberhasilan kepemimpinan desa tergantung pada kemampuan kepala desa untuk mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat melalui interaksi yang efektif, seperti motivasi, komunikasi, dan koordinasi. Gaya kepemimpinan demokratis, seperti yang diterapkan di Desa Denok, menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai pembangunan yang lebih merata. Namun, kurangnya implementasi program pemerintah oleh kepala desa di Desa Denok telah menyebabkan ketimpangan pembangunan antar dusun, yang mencerminkan perlunya kepemimpinan yang lebih responsif dan inklusif untuk mengatasi kesenjangan sosial (Fathoni & Rengu, 2015).

4. Proses Demokrasi Desa

Demokrasi di Indonesia menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, dengan partisipasi masyarakat sebagai aspek penting dalam menjaga keberlanjutannya. Pemilu rutin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakil legislatif, presiden, dan kepala daerah, sehingga

memungkinkan keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan politik. Seiring kemajuan teknologi dan media sosial, masyarakat kini lebih mudah mengakses informasi dan terlibat dalam diskusi politik. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan seperti penyebaran misinformasi, polarisasi politik, dan ujaran kebencian, yang mengancam kualitas partisipasi publik. Untuk menjaga partisipasi yang sehat, diperlukan regulasi yang melindungi kebebasan berekspresi dan data pribadi serta menangkal konten negatif, demi terwujudnya kebijakan yang inklusif (Fitriani et al., 2023).

Dalam konteks desa, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pasca-reformasi menunjukkan bahwa demokrasi desa semakin tergerus oleh pengaruh eksternal. Meskipun Pilkades diharapkan merepresentasikan demokrasi desa, kebijakan dari pemerintah pusat yang prosedural sering kali mengarah pada demokrasi modern ala negara, yang mengabaikan aspirasi murni masyarakat desa. Akibatnya, otonomi desa melemah, terlihat dari munculnya fenomena calon pasangan suami-istri untuk menghindari calon tunggal, serta maraknya praktik money politics dan ketidaknetralan perangkat desa tanpa tindak lanjut hukum yang tegas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun formalitas demokrasi desa dijaga, esensinya semakin memudar akibat dominasi kebijakan eksternal dan lemahnya penegakan hukum (Ummah et al., 2023).

Desa Batu Timbau menerapkan pendekatan demokrasi berbasis adat yang disebut "Batu Timbaunisasi Demokrasi." Sistem ini memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin tanpa pengaruh eksternal, dengan aturan bahwa hanya masyarakat adat asli yang bisa mencalonkan diri. Aturan ini dibentuk melalui musyawarah desa, didukung pemerintah, dan menghasilkan demokrasi yang khas dan selaras dengan tradisi setempat. Pendekatan ini menggambarkan model demokrasi lokal yang berupaya mempertahankan otonomi desa sekaligus menghormati nilai-nilai tradisional masyarakat (Aminurosyah et al., 2021).

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, saya mengacu pada dua kerangka teori utama untuk menganalisis fenomena dinasti politik di tingkat desa, khususnya dalam kasus dominasi Atma Wijaya dalam kepemimpinan Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes. Pertama, Teori *Historical Institutionalism* dari Sven Steinmo digunakan sebagai acuan metodologi untuk memahami bagaimana institusi politik desa berkembang dari waktu ke waktu serta bagaimana aturan, norma, dan kebiasaan yang telah mengakar mempengaruhi pola kepemimpinan yang bersifat dinastik. Pendekatan ini memungkinkan saya untuk melihat bagaimana faktor historis dan institusional berkontribusi terhadap keberlanjutan dominasi politik oleh satu keluarga dalam sistem pemerintahan desa. Kedua, Teori Kekerabatan dari Donald V. Kurtz digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis peran hubungan keluarga dalam pembentukan dan pelanggaran dinasti politik. Dengan menggunakan teori ini, saya dapat mengkaji bagaimana jaringan kekerabatan menjadi modal sosial dan politik yang memperkuat dominasi suatu keluarga dalam pemerintahan desa, serta bagaimana loyalitas keluarga dan hubungan patron-klien berperan dalam mempertahankan kekuasaan secara turun-temurun. Kombinasi kedua teori ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana dinasti politik di tingkat desa tidak hanya dipengaruhi oleh struktur institusional yang telah terbentuk, tetapi juga oleh ikatan kekerabatan yang memainkan peran sentral dalam proses politik lokal.

1. *Historical Institutionalism*

Historical Institutionalism menurut Sven Steinmo merupakan pendekatan dalam studi politik yang menggarisbawahi peran krusial institusi dalam membentuk perilaku dan hasil politik. Institusi, baik formal maupun informal, memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana keputusan politik dibuat dan diterapkan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya memperhatikan konteks sejarah dalam menganalisis institusi politik. Dengan memahami sejarah institusi, kita dapat melacak perkembangan dan perubahan

yang mempengaruhi dinamika politik saat ini (Steinmo, 2008).

HI juga menekankan pentingnya memahami interaksi antar institusi dalam sistem politik. Dengan melihat bagaimana institusi saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, kita dapat memahami kompleksitas dinamika politik yang melibatkan berbagai lembaga. Selain itu, HI mengarahkan kita untuk menganalisis perubahan institusi dari waktu ke waktu. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan institusi, kita dapat meramalkan implikasi keputusan politik di masa depan. Secara keseluruhan, Historical Institutionalism memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami peran institusi, sejarah, ideologi, dan interaksi antar lembaga dalam pembentukan dan perubahan dinamika politik (Steinmo, 2008). Untuk mendukung argumennya Steinmo, dkk menjelaskan poin penting dari bukunya yang berjudul "Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis".

a. Peran Institusi dalam Politik

Institusi memainkan peran sentral dalam membentuk dinamika politik dan kebijakan dengan tidak hanya berfungsi sebagai struktur statis, tetapi juga sebagai entitas yang dapat berubah dan beradaptasi seiring waktu. Dengan mempengaruhi perilaku aktor politik dan hasil kebijakan, institusi menciptakan pola-pola tertentu dalam interaksi sosial dan politik. Aturan dan norma yang ditetapkan oleh institusi membentuk preferensi serta strategi aktor, yang selanjutnya memengaruhi keputusan politik dan kebijakan yang diambil (Steinmo et al., 1992).

Dalam konteks negara demokratis, kebijakan publik biasanya mencerminkan aspirasi masyarakat, sedangkan di negara non-demokratis, aspirasi masyarakat sering mengalami distorsi. Proses pembuatan kebijakan yang demokratis sangat bergantung pada adanya "ruang publik" atau dialog, yang memungkinkan kebijakan dirancang untuk melibatkan warga negara dalam proses demokratisasi. Demokratisasi melibatkan lobbying dan negosiasi untuk mencapai kompromi yang mencerminkan berbagai kepentingan masyarakat (Iskandar, 2017).

Kebijakan yang efektif tidak hanya menginformasikan masyarakat, tetapi juga menyediakan ruang untuk dialog dan klarifikasi. Oleh karena itu, lembaga politik formal seperti DPR/DPRD perlu meningkatkan komunikasi politik dengan rakyat, membangun interaksi langsung untuk menyerap aspirasi, dan mengembangkan model komunikasi dialogis. Selain itu, lembaga politik dan pemerintah harus memperkuat partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif warga. Studi institusi juga mencakup analisis tentang bagaimana kekuasaan dan kepentingan berinteraksi dalam pembentukan dan pemeliharaan institusi, serta bagaimana perubahan dalam institusi dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga (Iskandar, 2017).

b. Critical Juncture

Konsep *Critical Juncture* atau titik waktu merujuk pada peristiwa penting di mana institusi membuat atau mengubah keputusan yang dapat memengaruhi perkembangan politik dalam jangka panjang. Pada titik-titik ini, keputusan yang diambil bisa mengarah pada jalur politik yang berbeda, menciptakan pola-pola baru dalam kebijakan dan interaksi sosial. Memahami *critical juncture* sangat penting untuk menganalisis sejarah politik dan evolusi institusi, karena pada saat-saat ini, keputusan yang dibuat sering kali menentukan arah kebijakan dan struktur kekuasaan di masa depan (Steinmo et al., 1992).

Critical juncture sering kali muncul dalam konteks krisis atau perubahan besar, dimana aktor politik harus membuat keputusan signifikan. Dalam situasi seperti itu, faktor-faktor seperti agama, kepribadian, penampilan, partai politik, suku bangsa, dan latar belakang keluarga dapat memainkan peran penting dalam menentukan hasil keputusan (Violin et al., 2024). Kepentingan dan kekuasaan yang ada dapat terungkap, dan hasil dari keputusan tersebut dapat memperkuat posisi pemenang, menunjukkan bahwa analisis institusi tidak hanya tentang stabilitas tetapi juga tentang bagaimana perubahan dapat terjadi dan membentuk masa depan politik. Mempelajari

critical juncture memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini dan bagaimana mereka berinteraksi dengan konteks sosial dan politik yang lebih luas (Steinmo et al., 1992).

c. Interaksi antara Kepentingan dan Institusi

Salah satu kontribusi utama dari pendekatan institusional historis adalah pemahaman tentang interaksi antara kepentingan dan institusi. Pendekatan ini menekankan bahwa institusi tidak hanya dibentuk oleh kepentingan material, tetapi juga oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, perubahan dalam pemikiran dan nilai-nilai dapat mempengaruhi struktur institusi dan hasil kebijakan. Interaksi ini menciptakan dinamika kompleks, di mana ide-ide baru dapat muncul dan menantang institusi yang ada (Steinmo et al., 1992).

Ketika ide-ide ini diterima dan diinternalisasi oleh aktor politik, mereka dapat memicu perubahan dalam kebijakan dan praktik institusi. Pendekatan ini juga mengakui bahwa institusi dapat membentuk cara orang berpikir dan bertindak, sehingga menciptakan siklus di mana institusi, ide, dan kepentingan saling mempengaruhi. Memahami bagaimana ide-ide dan nilai-nilai berkembang serta berinteraksi dengan kepentingan politik sangat penting untuk menganalisis perubahan politik dan kebijakan di berbagai konteks (Steinmo et al., 1992).

d. *Path Dependency*

Konsep *path dependency* sebagaimana dijelaskan oleh Sven Steinmo yaitu mengacu pada gagasan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil pada suatu waktu dapat membentuk dan membatasi pilihan di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah dan konteks institusional memainkan peran penting dalam menentukan arah perkembangan kebijakan dan politik. Dengan diadopsinya suatu kebijakan, norma dan struktur yang mendukungnya mulai terbentuk, tetapi di sisi lain, hal ini juga menciptakan hambatan untuk mengubah arah atau kembali ke kebijakan sebelumnya (Steinmo et al., 1992). Keputusan awal dalam proses kebijakan memiliki dampak besar karena mampu mengarahkan perkembangan ke jalur tertentu yang sulit diubah.

Kebijakan sebelumnya dapat memengaruhi bagaimana masalah didefinisikan dan solusi dipandang, sehingga menciptakan perspektif yang mendominasi di bidang tertentu. Selain itu, institusi sering kali beradaptasi untuk mendukung kebijakan yang ada, yang kemudian memperkuat jalur tersebut. Namun, interaksi antara berbagai domain politik dapat menciptakan peluang bagi aktor politik untuk memperkenalkan ide baru meskipun jalur yang ada tampak dominan (Steinmo et al., 1992).

Path dependency menekankan pentingnya analisis historis dalam memahami dinamika politik dan kebijakan. Keputusan di masa lalu tidak hanya membentuk konteks politik saat ini, tetapi juga menciptakan hubungan kompleks antara sejarah, institusi, dan strategi politik. Institusi tidak hanya membatasi pilihan, tetapi juga merupakan hasil dari konflik politik dan keputusan aktor dalam konteks tertentu. Dengan demikian, konsep ini membantu menjelaskan bagaimana pilihan sebelumnya memengaruhi kebijakan saat ini dan masa depan, serta memberikan wawasan tentang pentingnya memahami sejarah dalam analisis kebijakan (Steinmo et al., 1992).

2. Teori Politik Kekerabatan

Untuk memperdalam penelitian ini, saya menambahkan Teori Politik Kekerabatan menurut Donald V. Kurtz yang dalam teori politik kekerabatannya menyoroti betapa pentingnya struktur kekerabatan dalam pembentukan aliansi politik dan bagaimana hubungan kekerabatan dapat berfungsi sebagai fondasi kekuasaan politik. Kekerabatan memungkinkan individu atau kelompok untuk mengakses sumber daya dan memperoleh posisi kekuasaan melalui strategi seperti pernikahan antar kelompok kekerabatan, yang memperkuat posisi politik dan sosial serta memperluas jaringan dukungan. Kurtz juga menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam memilih aliansi kekerabatan dapat membantu dalam mencapai tujuan politik. Meskipun banyak analisisnya berfokus pada masyarakat adat, prinsip-prinsip ini juga relevan dalam konteks masyarakat modern, di mana dinasti politik sering terbentuk melalui pernikahan strategis dan aliansi kekerabatan (Kurtz,

2018). Untuk mendukung argumennya, Kurtz menjelaskan poin penting dari politik kekerabatan sebagai berikut.

a. Peran *Kinship* dalam Struktur Politik

Kinship atau hubungan kekerabatan memainkan peran penting dalam membentuk struktur politik. Selain mengatur interaksi sosial, kekerabatan juga menentukan aliansi politik, di mana individu sering membentuk jaringan dukungan keluarga untuk mempertahankan kekuasaan dan sumber daya. Aliansi ini dapat diperkuat melalui pernikahan antar keluarga, menunjukkan bahwa *kinship* bukan hanya aspek sosial, tetapi juga strategi politik. Oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan kekerabatan menjadi kunci dalam menganalisis dinamika kekuasaan dalam masyarakat (Kurtz, 2018).

Di tingkat lokal, peran kekerabatan sangat erat kaitannya dengan sistem politik desa. Desa-desa masih mempertahankan sistem kekerabatan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kelompok elit yang terbentuk berdasarkan ikatan kekerabatan sering kali mendominasi masyarakat. Jaringan kekerabatan ini memberi keuntungan bagi calon kepala desa dalam pemilihan, dengan keluarga berperan dalam memberikan informasi, dukungan, dan motivasi kepada pemilih. Peran keluarga bisa memotivasi partisipasi aktif dalam politik, tetapi jika tidak dikelola dengan benar, bisa juga merusak proses demokrasi (Rahayu & Hamidah, 2013).

b. Aliansi dan Pernikahan

Aliansi yang dikembangkan oleh Levi-Strauss memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pernikahan dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk aliansi politik. Dalam banyak masyarakat, pernikahan bukan hanya ikatan pribadi antara dua individu, tetapi juga merupakan strategi untuk mengamankan kekuasaan dan sumber daya. Pernikahan antara sepupu atau anggota keluarga lainnya sering kali dilakukan untuk memperkuat hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda, menciptakan jaringan dukungan yang saling menguntungkan (Kurtz, 2018).

Levi-Strauss menunjukkan bahwa pernikahan dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur pertukaran sumber daya dan kekuasaan. Dengan

mengatur pernikahan di antara kategori tertentu dari sepupu, individu dapat mengontrol akses ke sumber daya yang penting dan memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial. Ini menciptakan dinamika di mana kelompok-kelompok yang memiliki hubungan kekerabatan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan politik bersama, sementara kelompok lain dianggap sebagai musuh (Levi-Strauss, 1969).

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun teori aliansi memberikan kerangka kerja yang berguna, ada juga kritik terhadap pendekatan ini. Beberapa antropolog berpendapat bahwa fokus yang terlalu besar pada pernikahan dan aliansi dapat mengabaikan faktor-faktor lain yang juga berperan dalam dinamika politik. Oleh karena itu, meskipun teori aliansi memberikan wawasan yang berharga, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek lain dari hubungan sosial dan politik dalam analisis *kinship*.

c. Fleksibilitas dalam Struktur Sosial

Fleksibilitas dalam struktur sosial yang dihasilkan dari hubungan kekerabatan memungkinkan individu untuk membuat pilihan strategis yang mempengaruhi perkembangan politik. Di banyak masyarakat, individu dapat memilih pasangan atau membentuk aliansi berdasarkan kebutuhan politik dan sosial mereka, memberikan ruang untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial dan politik. Sebagai contoh, seorang pemimpin mungkin memilih untuk menikahi anggota keluarga dari kelompok lain sebagai strategi untuk mengamankan dukungan politik atau sumber daya, menjadikan pernikahan sebagai alat strategis untuk meningkatkan status sosial dan kekuasaan. Fleksibilitas ini juga memungkinkan individu untuk beralih antara hubungan kekerabatan dan non-kekerabatan, memperluas jaringan mereka untuk mendukung tujuan politik (Kurtz, 2018).

Namun, pernikahan politik sering kali menjadi strategi yang digunakan oleh elit politik untuk mempertahankan status quo, memastikan bahwa kekuasaan tetap dalam kelompok tertentu, serta menjaga hubungan saling menguntungkan. Selain memperkuat relasi yang sudah ada, pernikahan politik dapat memperluas jaringan pengaruh dan mengamankan dukungan politik

yang berkelanjutan. Akan tetapi, dampak negatif dari penyalahgunaan kekuasaan melalui praktik ini tidak dapat diabaikan, terutama terhadap masyarakat luas. Salah satu dampak paling signifikan adalah penurunan kepercayaan publik terhadap pemangku kepentingan negara, seperti pemerintah dan lembaga politik. Masyarakat juga mengalami kerugian, baik secara material akibat kebijakan yang mungkin tidak adil, maupun secara moral karena terancamnya integritas dan keadilan dalam sistem politik (Rizky, 2022).

Teori *Historical Institutionalism* dan politik kekeluargaan yang memiliki fokus pada konsep dinasti politik dapat menunjukkan kecenderungan pewarisan kekuasaan dalam keluarga tertentu dan pengaruhnya dalam sistem pemerintahan sehingga dapat merusak sistem demokrasi desa. Dinasti politik yang sering kali dipegang oleh anggota keluarga dari generasi ke generasi dapat menciptakan dominasi dan mempengaruhi struktur kekuasaan. Dalam konteks skripsi berjudul "Dinasti Politik di Tingkat Desa: Studi Kasus Dominasi Dinasti Atma Wijaya Pada Kepemimpinan Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes" fenomena dinasti politik ini relevan untuk menganalisis bagaimana keluarga Atma Wijaya mempertahankan dan memperluas kekuasaannya dalam pemerintahan desa, serta dampak dari hubungan kekeluargaan ini terhadap proses demokratisasi dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

BAB III

LANSKAP DESA SINDANGWANGI

Pada bab ini saya membahas terkait gambaran umum dan profil dinasti Atma Wijaya di Desa Sindangwangi yang menjadi konteks penelitian ini dilakukan. Pembahasan ini akan dimulai dari gambaran umum yang mencakup sejarah Desa Sindangwangi, kondisi geografis Desa Sindangwangi, kondisi demografis Desa Sindangwangi, struktur pemerintahan Desa Sindangwangi, kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Desa Sindangwangi, serta dinamika politik Desa Sindangwangi. Kemudian pada profil dinasti Atma Wijaya yang mencakup munculnya dinasti Atma Wijaya, silsilah keluarga Atma Wijaya, sumber kekuatan Atma Wijaya, dan jaringan Kekerabatan Atma Wijaya. Diskusi tentang konteks ini penting untuk menyajikan pengetahuan awal bagi pembaca agar bisa memahami topik kajian skripsi ini lebih baik, selain itu konteks ini menyajikan pembahasan yang menjadi pra kondisi yang membentuk menguatnya politik dinasti di Desa Sindangwangi.

A. Gambaran Umum Desa Sindangwangi

1. Sejarah Desa Sindangwangi

Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena aroma wangi yang selalu menyertai kehadirannya. Sang putri menjalani kisah yang penuh makna dan menjadi asal-usul berbagai tempat yang kini dikenal di Kecamatan Bantarkawung dan sekitarnya. Pada suatu waktu, sang putri turun dari kahyangan dan singgah di sebuah tempat yang indah. Di sana, ia mandi di sebuah pancuran. Lokasi pertama tempat turunnya sang putri kemudian dikenal dengan nama Dukuh Cipancur, yang berasal dari kata pancur atau turun. Setelah itu, sang putri melanjutkan perjalanannya ke sebuah tempat tak jauh dari Cipancur. Di sana, ia memulai babak baru kehidupannya. Tempat tersebut kemudian dinamakan Dukuh Babakan, sebagai tanda awal kehidupan baru yang dimulai oleh sang putri.

Suatu hari, sang putri berjalan ke utara dari Babakan dan singgah di sebuah tempat yang asri. Saat berada di sana, aroma wangi tubuhnya tercium oleh warga sekitar. Karena peristiwa tersebut, wilayah tersebut diberi nama Dukuh Sindangwangi, yang berarti tempat persinggahan yang wangi. Dalam perjalanannya, sang putri tiba di sebuah wilayah yang berada di perbatasan. Di sana, ia bertemu seorang pemuda tampan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Perasaan cinta pun tumbuh di antara mereka. Namun, cinta itu tak dapat bersatu karena perbedaan status. Mereka terpaksa mengakhiri hubungan mereka di tepi sungai yang membatasi wilayah tersebut. Sungai itu kemudian diberi nama Ciheuleut, berasal dari Bahasa Sunda: Ci berarti sungai, dan Heuleut berarti batas. Nama ini melambangkan lokasi perbatasan antara Kecamatan Bantarkawung dan Kecamatan Ketanggungan.

Setelah meninggalkan Ciheuleut, sang putri berhenti di sebuah wilayah lain, yaitu Randegan. Namun, kali ini warga di sana tidak mencium aroma wangi dari sang putri. Akibatnya, mereka meragukan cerita tentang sang putri yang harum. Wilayah tersebut akhirnya dinamakan Dukuh Marenggeng, yang berarti keraguan atau ketidakpercayaan. Kabar tentang sang putri yang harum menyebar ke berbagai wilayah. Cerita ini terdengar hingga sebuah tempat bernama Cikamuning, kemudian meluas ke atas wilayah yang kini dikenal sebagai Desa Pengarasan. Kisah sang putri terus berkembang, hingga mencapai sebuah wilayah bernama Kemandungan, yang artinya tempat kabar itu tertahan dan diterima oleh warga. Akhirnya, kabar ini berhenti di sebuah daerah yang dulunya disebut Majeti, yang bermakna ibu sejati atau tempat asal. Wilayah tersebut kini berubah nama menjadi Dukuh Jetak, sebagai simbol akhir perjalanan kabar sang putri.

Kisah sang putri yang harum tak hanya menjadi cerita legenda, tetapi juga membentuk identitas dan sejarah tempat-tempat yang ada hingga kini. Setiap dukuh dan desa menyimpan jejak perjalanan dan peristiwa yang terukir dalam memori masyarakat setempat. Legenda ini menjadi saksi tentang hubungan manusia dengan keindahan alam, cinta, dan makna yang mendalam di balik setiap nama.

2. Geografis Desa Sindangwangi

Desa Sindangwangi terletak di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini memiliki luas wilayah 1.628,2 hektar, atau sekitar 9% dari luas Kecamatan Bantarkawung. Wilayah Desa Sindangwangi terdiri dari 6 dusun, yaitu Dusun Jetak, Dusun Sindangwangi (Sindangwangi Lama dan Baru), Dusun Cipancur, Dusun Babakan, Dusun Marenggeng, dan Dusun Cheuleut. Secara administratif, desa ini dibagi menjadi 8 RW dan 31 RT. Saat ini, Desa Sindangwangi dipimpin oleh Kepala Desa Irawati Fatmah, S.Ag.

Gambar 3.1 Peta Desa Sindangwangi



Sumber:

[https://maps.app.goo.gl/M3moZzpmadhAeiHx9?g_st=com.google.maps.preview.
copy](https://maps.app.goo.gl/M3moZzpmadhAeiHx9?g_st=com.google.maps.preview.copy)

Desa Sindangwangi berada di daerah perbukitan yang didominasi oleh hamparan sawah. Desa ini merupakan salah satu penghasil beras utama di wilayah tersebut, dengan "Beras Jetak" sebagai produk unggulannya. Selain beras, Desa Sindangwangi juga menghasilkan komoditas lain seperti bawang merah, jagung, dan singkong. Salah satu infrastruktur penting di desa ini adalah Bendungan Patahunan, yang berfungsi untuk mengairi sawah di Desa

Sindangwangi, Desa Jipang, dan Desa Pengarasan. Bendungan ini juga menjadi tempat rekreasi bagi warga setempat, sekaligus area memancing, berenang, dan penambangan pasir. Bendungan Patahunan terletak di antara Gunung Geulis dan lembah Gajah Mungkur, menambah keindahan alam sekitar.

Adapun batas-batas wilayah Desa Sindangwangi sebagai berikut, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ketanggungan, di sebelah timur dengan Desa Pengarasan, di sebelah selatan dengan Desa Jipang, dan di sebelah barat dengan Kecamatan Salem. Kombinasi kekayaan alam, produk pertanian, dan potensi wisata menjadikan Desa Sindangwangi sebagai salah satu desa yang memiliki daya tarik tersendiri di Kabupaten Brebes.

3. Kondisi Demografis Desa Sindangwangi

Berdasarkan data dalam Buku Profil Desa Sindangwangi 2023, data jumlah penduduk Desa Sindangwangi dihuni oleh 9.119 jiwa, yang terdiri dari 4.631 laki-laki dan 4.488 perempuan dengan kepadatan penduduk 560,07/km² yang artinya setiap 1 km² wilayah Desa Sindangwangi dihuni oleh 560 orang. Dengan total 2.831 Kartu Keluarga (KK). Komposisi penduduk Desa Sindangwangi didominasi oleh kelompok usia 20-24 dengan jumlah 759 jiwa kemudian yang terendah ada pada rentang usia 75+ dengan 82 jiwa.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Desa Sindangwangi, 2023

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	317	343	660
2	5-9	334	333	667
3	10-14	334	331	665
4	15-19	331	338	669
5	20-24	385	374	759

6	25-29	299	412	711
7	30-34	348	344	692
8	35-39	338	311	649
9	40-44	325	350	675
10	45-49	386	370	756
11	50-54	328	299	627
12	55-59	306	240	546
13	60-64	250	166	416
14	65-69	151	156	307
15	70-74	149	87	236
16	75+	49	33	82
Jumlah		4.631	4.488	9.119

Sumber : Buku Profil Desa Sindangwangi 2023

Berdasarkan tabel diatas banyaknya penduduk usia produktif atau sudah mampu untuk bekerja (15-64 tahun) di Desa Sindangwangi mengakibatkan tingginya jumlah angkatan kerja di Desa Sindangwangi dibandingkan dengan bukan angkatan kerja (64 tahun keatas). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angkatan kerja merupakan penduduk dengan usia produktif (15-64) yang bekerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tabel 3.2 Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Sindangwangi, 2023

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	3-6 tahun belum TK	29	27
2	3-6 tahun sedang TK	235	260
3	Tidak pernah sekolah	144	250
4	Sedang sekolah	774	753
5	Tamat SD/ sederajat	898	997
6	Tamat SMP/ sederajat	1.675	1.506

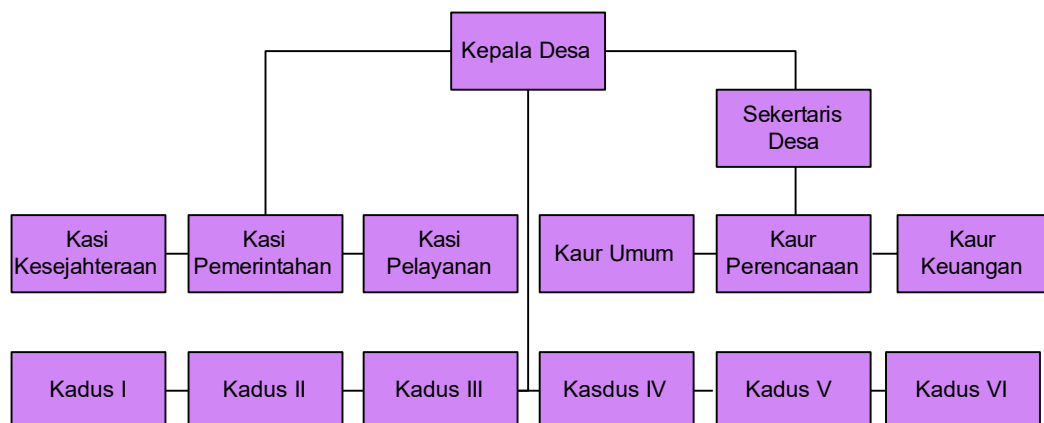
7	Tamat SMA/ sederajat	797	635
8	Tamat D-1/ sederajat	0	0
9	Tamat D-2/ sederajat	0	0
10	Tamat D-3/ sederajat	18	26
11	Tamat S-1/ sederajat	51	40
12	Tamat S-2/ sederajat	3	1
Jumlah Total		9.119	

Sumber: Profil Desa Sindangwangi 2023

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan 3.181 masyarakat Desa Sindangwangi merupakan lulusan SMP/ sederajat, kemudian 1.895 masyarakat hanya bersekolah sampai SD. Sebanyak 1.432 bersekolah sampai SMA/ sederajat, dan 394 masyarakat Desa Sindangwangi tidak pernah bersekolah. Maka dapat dikatakan tingkat pendidikan di Desa Sindangwangi masih terbilang rendah, hal ini dapat dilihat dari mayoritas penduduk yang hanya tamatan SMP, sedangkan pemerintah Republik Indonesia mewajibkan Pendidikan minimal 12 tahun. Fenomena ini terjadi karena anggapan masyarakat Desa Sindangwangi setelah lulus SMP merupakan usia ideal untuk mulai bekerja, hal ini juga terjadi karena latar belakang ekonomi yang terjadi di Desa Sindangwangi.

4. Struktur Politik dan Pemerintahan Desa Sindangwangi

Gambar 3.2 Struktur Pemerintahan Desa Sindangwangi



Sumber: Profil Desa

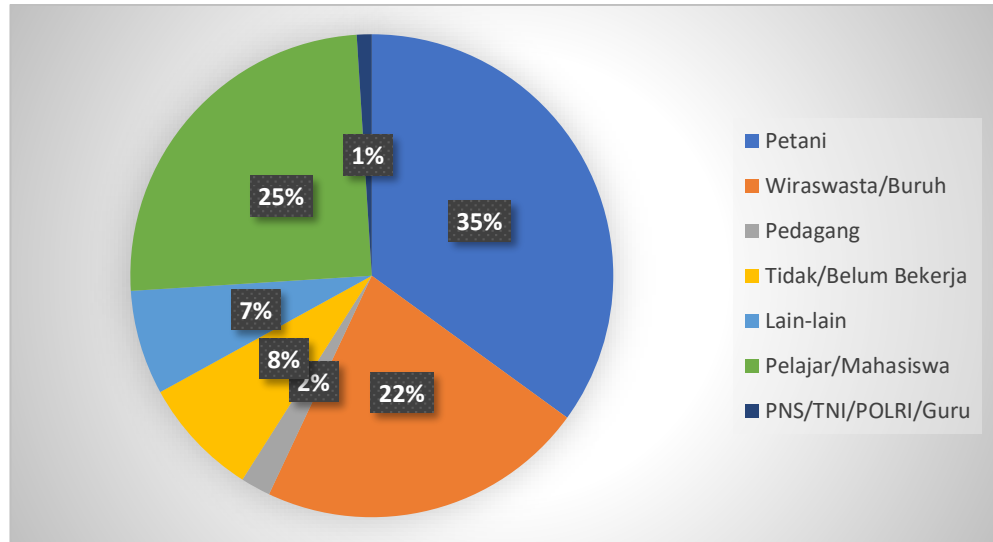
Berdasarkan bagan diatas Desa Sindangwangi di pimpin oleh Irawati Fatmah, di periode ke tiganya dia menjabat dari 2020-2026. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh sekertaris desa yang dipegang oleh Endang Kusnandar. Desa Sindangwangi memiliki tiga Kepala Urusan (Kaur) yakni Kaur Keuangan dipegang oleh Omo Sumarmo,, Kaur Umum tidak ada yang mengisi, dan Kaur Perencanaan yang dipegang oleh Lestari Ekawati. Ketiga Kaur tersebut tugasnya membantu sekertasris desa dalam urusan pelayanan administrasi pemerintahan desa. Kemudian ada tiga Kepala Seksi (Kasi) yakni Kasi Pelayanan yang dipegang oleh Ahmad Furqon, Kasi Pemerintahan yang dipegang oleh Iin Yuningsih, dan Kasi Kesejahteraan yang dipegang oleh Nona Purnamasari. Ketiga Kasi tersebut tugasnya membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kemudian enam kepala dusun yang tugasnya membantu kepala desa dalam Kepala Desa pelaksanaan tugas wilayahnya.

Visi Desa Sindangwangi: “Desa bangun tata Kelola pemerintahan Desa yang baik dan bersith, guna terujudnya masyarakat Desa Sindangwangi yang adil, makmur, sejahtera, peduli, mandiri, dan berbudi luhur”.

Misi pertama, Menciptakan kondis masyarakat Desa Sindangwangi yang aman, nyaman, tertib, guyub, rukul dalam kehidupan bermasyarakat. Misi kedua, Optimaliasi Penyelenggaran emerintah Desa Sindangwangi yang meliputi penyelenggaraan. Misi Ketiga, Pemerintahan Desa yang bersih dan transfaran pelaksanaan pembangunan Desa yang adil dan berkesinambungan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan benar Memberdayakan semua potensi yang ada dimasyarakat meliputi SDA dan SDM. Misi keempat, Bekerjasama dengan kabupaten, provinsi dan pusat dalam mewujudkan pembangunan Desa^[L]_{SEP}Sindangwangi. Dan misi kelima, Membiasakan kepada masyarakat untuk memiliki sifat peduli dan budaya gotong royong.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Budaya Desa Sindangwangi

Gambar 3.3 Presentase Pekerjaan Masyarakat Desa Sindangwangi



Sumber: Profil Desa Sindangwangi 2023

Berdasarkan data yang diatas, sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat Desa Sindangwangi dengan persentase sebesar 35%. Hal ini menunjukkan bahwa desa ini memiliki lahan pertanian yang luas dan bergantung pada hasil pertanian sebagai sumber utama perekonomian. Selain itu, sebanyak 22% penduduk bekerja sebagai wiraswasta atau buruh, menjadikannya sektor terbesar kedua setelah pertanian. Tingginya jumlah wiraswasta atau buruh mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki semangat merantau menjadi pekerja bangunan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Di sisi lain, pendidikan juga memiliki peran penting dalam masyarakat, terbukti dengan 25% penduduk berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Ini menunjukkan adanya potensi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan desa di masa depan. Namun, tantangan juga terlihat dari jumlah penduduk yang tidak atau belum bekerja sebesar 8%, yang menunjukkan adanya kesulitan dalam penyediaan lapangan kerja. Selain itu, 7% masyarakat memiliki pekerjaan lainnya yang tidak tetap.

Sektor perdagangan di desa ini masih tergolong rendah, dengan hanya 2% penduduk yang berprofesi sebagai pedagang. Ini menunjukkan bahwa

perdagangan belum berkembang pesat, meskipun memiliki potensi untuk ditingkatkan melalui pelatihan kewirausahaan dan penguatan pasar lokal. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja sebagai PNS, TNI, POLRI, atau guru hanya 1%, yang menandakan bahwa pekerjaan di sektor pemerintahan dan pendidikan sangat terbatas.

Secara keseluruhan, Desa Sindangwangi masih didominasi oleh sektor pertanian dan wiraswasta. Pendidikan memiliki peran penting dengan tingginya jumlah pelajar dan mahasiswa, yang berpotensi meningkatkan ekonomi desa di masa depan. Namun, tingkat pengangguran yang cukup tinggi menunjukkan perlunya upaya dalam menciptakan lapangan kerja baru. Sektor perdagangan yang masih rendah juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian lokal. Selain itu, minimnya jumlah pekerja di sektor pemerintahan menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan formal masih terbatas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa dapat fokus pada pengembangan sektor perdagangan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta inovasi dalam bidang pertanian dan wiraswasta.

Gambar 3.4 Kondisi Pertanian Desa Sindangwangi



Sumber: Maulana, 2024 (Dokumen Pribadi)

Pemanfaatan lahan di Desa Sindangwangi mencerminkan karakteristik ekonomi agraris dengan luas lahan sawah sebesar 224 hektar dan lahan kering

mencapai 460,8 hektar, yang dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura dan perkebunan skala kecil. Selain itu, terdapat 25,5 hektar tanah bengkok yang dikelola perangkat desa serta 910 hektar hutan yang memiliki potensi ekonomi melalui pemanfaatan kayu, hasil hutan non-kayu, atau ekowisata. Namun, pengelolaan sumber daya ini masih menghadapi tantangan dalam hal produktivitas, akses pasar, serta keberlanjutan lingkungan. Jika dikelola dengan baik, lahan-lahan tersebut dapat menjadi aset ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, keterbatasan dalam pengelolaan lahan dan minimnya peluang kerja lokal mendorong banyak penduduk untuk merantau demi mendapatkan penghasilan yang lebih layak.

Dalam analisis ekonomi, ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian dengan sistem tradisional menjadi kendala dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara itu, perantauan memberikan kontribusi ekonomi dalam bentuk remitan, tetapi juga mencerminkan minimnya peluang kerja lokal. Selain itu, tingginya angka pengangguran menunjukkan perlunya upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, wirausaha, dan diversifikasi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pemanfaatan lahan kering untuk pertanian hortikultura bernilai tinggi serta pengembangan sektor pariwisata dan industri kecil dapat menjadi solusi untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Jika berbagai sektor ini dapat dikembangkan dengan baik, Desa Sindangwangi tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian, tetapi juga menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, Desa Sindangwangi memiliki potensi ekonomi yang cukup besar jika sumber daya alam dan tenaga kerja yang tersedia dapat dikelola secara optimal. Modernisasi sektor pertanian, penciptaan lapangan kerja baru, serta pengembangan usaha berbasis komunitas menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengembangkan ekonomi desa yang lebih mandiri dan berdaya saing. Namun,

selain faktor ekonomi, karakter sosial dan budaya masyarakat juga turut mempengaruhi dinamika pembangunan desa.

Desa Sindangwangi merupakan contoh masyarakat yang masih mempertahankan sistem sosial dan budaya tradisional. Kekerabatan yang erat menjadi ciri khas kehidupan sosial, di mana gotong royong dan solidaritas tetap dijunjung tinggi. Namun, eksklusivitas dalam sistem ini juga membatasi masuknya pemikiran modern dan inovasi. Selain itu, kepercayaan terhadap nilai-nilai spiritual dan praktik mistis, seperti penghormatan terhadap paranormal Atma Wijaya, tetap kuat di kalangan masyarakat. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, praktik bertapa di gunung dan kepercayaan terhadap hal-hal gaib masih sering dilakukan, menunjukkan adanya sinkretisme antara kepercayaan lokal dan agama yang lebih formal. Tradisi ini, meskipun memperkuat identitas budaya, juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan inovasi dan pendekatan rasional dalam pengelolaan ekonomi desa.

Di sisi lain, keterbatasan ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah turut mempengaruhi pola pikir masyarakat. Dengan mayoritas penduduk hanya lulusan SMP, wawasan terhadap konsep politik dan ekonomi masih terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh praktik politik uang, di mana keputusan politik sering kali didasarkan pada manfaat material jangka pendek daripada pertimbangan ideologis atau visi kandidat. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga memperkuat ketergantungan terhadap praktik mistis dalam menghadapi permasalahan hidup, mengingat akses terhadap pemikiran yang lebih rasional masih terbatas. Kondisi ini semakin memperumit upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena perubahan sosial dan ekonomi tidak dapat terjadi tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan ekonomi masyarakat Desa Sindangwangi. Program literasi, pelatihan keterampilan, serta penyuluhan sosial dan keagamaan dapat menjadi langkah awal untuk membuka wawasan masyarakat terhadap pola

pikir yang lebih kritis dan rasional. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat tetap mempertahankan identitas budaya mereka tanpa harus terjebak dalam pola pikir yang membatasi perkembangan sosial dan ekonomi. Jika perubahan ini dapat diwujudkan, Desa Sindangwangi tidak hanya akan tumbuh sebagai desa yang lebih sejahtera secara ekonomi, tetapi juga memiliki masyarakat yang lebih berdaya dan siap menghadapi tantangan zaman.

6. Dinamika Politik Desa Sindangwangi

Tabel 3.3 Urutan Jabatan Kepala Desa Sindangwangi dari Awal Sampai Sekarang, Beserta Periode Menjabat dan Status Keluarga

No	Nama	Periode Menjabat	Status
1	Atma Wijaya	1933-1983	Kepala Desa Pertama Desa Sindangwangi
2	Mahyoto	1983-1986	Adik Sepupu Atma Wijaya
3	Mian	1986-1990	Sepupu dari Istri Atma Wijaya
4	Edi Sunarso	1990-1994	Keponakan Atma Wijaya
5	Sudono	1994-2002	Cucu Atma Wijaya
6	Irawati Fatmah	2002-2014 dan 2020- sekarang	Adik Ipar Sudono
7	Daryo	2014-2020	Kakak Sepupu Sudono

Sumber: Wawancara tokoh masyarakat

Dinamika politik di Desa Sindangwangi menunjukkan pola dinasti politik yang kuat, tercermin dari urutan jabatan Kepala Desa yang hampir seluruhnya dipegang oleh anggota keluarga besar Atma Wijaya sejak desa ini dibentuk. Kepemimpinan dimulai dengan Atma Wijaya yang menjabat selama 50 tahun (1933-1983), dan kemudian diteruskan oleh kerabat dekatnya seperti adik sepupu, keponakan, cucu, hingga ipar. Hal ini mencerminkan bahwa

posisi kepala desa lebih cenderung diwariskan dalam lingkup keluarga besar Atma Wijaya, daripada melalui kompetisi politik yang terbuka. Setelah Atma Wijaya, jabatan kepala desa secara berurutan dipegang oleh Mahyoto, Mian, Edi Sunarso, Sudono, Irawati Fatmah, Daryo, dan kembali Irawati Fatmah pada periode 2020 hingga sekarang, dengan pola yang menunjukkan upaya menjaga kepemimpinan dalam lingkaran keluarga yang sama. Kembalinya Irawati Fatmah pada 2020 menandakan bahwa dinasti politik ini terus bertahan, dengan tidak ada indikasi bahwa kepemimpinan akan beralih ke individu di luar jaringan keluarga Atma Wijaya. Faktor kekerabatan memainkan peran penting dalam pemilihan kepala desa, dengan warga cenderung memilih figur dari keluarga yang sudah lama memimpin, sementara kontrol sumber daya dan pengaruh sosial keluarga ini semakin memperkuat keberlanjutan dinasti politik tersebut.

Pola dinasti politik ini membawa beberapa implikasi terhadap demokrasi lokal. Pertama, rendahnya tingkat kompetisi politik karena minimnya peluang bagi calon kepala desa dari luar keluarga besar Atma Wijaya untuk maju, yang dapat menghambat kemunculan pemimpin baru dengan perspektif berbeda. Kedua, stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan desa mungkin tercapai berkat kesinambungan kebijakan yang diambil oleh keluarga yang sama. Namun, ketiga, dominasi keluarga dalam kepemimpinan dapat meningkatkan potensi nepotisme, yang berisiko merugikan pengelolaan anggaran, kebijakan, dan distribusi sumber daya desa. Dengan demikian, meskipun stabilitas tercapai, terdapat dampak negatif yang perlu diwaspadai dalam pengelolaan desa.

Masa depan politik Desa Sindangwangi akan sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti sejauh mana generasi muda dari luar keluarga Atma Wijaya mulai berpartisipasi dalam politik desa, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi dan keterbukaan dalam pemilihan kepala desa, serta apakah akan ada intervensi regulasi atau kebijakan dari pemerintah yang membatasi keberlangsungan dinasti politik di tingkat desa. Tanpa adanya perubahan signifikan dalam pola politik ini dan peningkatan kesadaran

masyarakat, kemungkinan besar kepemimpinan di Desa Sindangwangi akan tetap berada di tangan keluarga besar Atma Wijaya dalam beberapa periode mendatang.

Selain itu, dinamika politik di Desa Sindangwangi juga mencerminkan perubahan kekuatan partai politik yang berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh faktor sejarah kepemimpinan lokal serta perubahan preferensi politik masyarakat. Dalam perkembangannya, dua partai besar yaitu Golkar dan PDI-P menjadi aktor utama dalam persaingan politik desa ini. Golkar merupakan partai yang paling kuat di Desa Sindangwangi selama beberapa dekade. Pengaruhnya mulai terasa sejak akhir masa jabatan kepala desa pertama, Atma Wijaya, yang mulai membangun basis dukungan melalui jaringan politik dan sosialnya. Kekuatan Golkar semakin mengakar ketika Sudono, cucu Atma Wijaya yang menjabat sebagai kepala desa ke-5, mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Brebes pada tahun 2004. Meskipun gagal dalam pencalonan pertama, Sudono berhasil terpilih pada tahun 2009, memperkuat dominasi Golkar di desa tersebut. Keberhasilan ini menunjukkan solidnya basis pemilih Golkar serta kuatnya pengaruh politik keluarga Atma Wijaya, sehingga Golkar menjadi partai dominan di Desa Sindangwangi.

Namun, sejak tahun 2014, dominasi Golkar mulai goyah seiring dengan meningkatnya pengaruh PDI-P. Partai ini, yang memiliki kekuatan besar di tingkat nasional, mulai mendapatkan tempat di Sindangwangi, didorong oleh kemenangan dalam Pemilu 2014 dan efek elektoral dari kepemimpinan nasional yang kuat. Pergeseran dukungan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perubahan kepemimpinan desa, dinamika sosial-ekonomi, serta strategi politik PDI-P yang semakin mengakar di masyarakat. Basis pendukung Golkar yang sebelumnya solid mulai terpecah, sementara PDI-P semakin mengonsolidasikan kekuatannya melalui jaringan kader dan program-program yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Sejak saat itu, persaingan antara Golkar dan PDI-P semakin ketat, menandai era baru dalam politik Sindangwangi. Tidak ada lagi partai yang mendominasi secara mutlak, dan kompetisi elektoral menjadi lebih dinamis.

PDI-P berupaya menarik simpati masyarakat melalui berbagai strategi politiknya, sementara Golkar berusaha mempertahankan pengaruhnya dengan mengandalkan jaringan dan loyalitas pemilih lama. Perubahan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Sindangwangi semakin rasional dalam menentukan pilihan politik mereka, tidak hanya bergantung pada faktor historis atau jaringan keluarga, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, serta kebijakan yang diusung masing-masing partai.

Secara keseluruhan, dinamika politik di Desa Sindangwangi menggambarkan perubahan lanskap politik yang semakin kompetitif. Dari dominasi Golkar yang berlangsung lama hingga munculnya tantangan dari PDI-P sejak 2014, menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat tidak lagi statis. Ke depan, persaingan antara kedua partai ini kemungkinan akan terus berlanjut, membuka peluang bagi aktor-aktor politik baru untuk ikut serta dalam menentukan arah politik desa ini.

B. Profil Dinasti Atma Wijaya

1. Munculnya Dinasti Atma Wijaya

Munculnya dinasti kepala desa di Sindangwangi bermula ketika kepemimpinan kepala desa pertama Atma Wijaya yang menjabat dari tahun 1933 hingga 1983. Atma Wijaya tidak hanya menjadi pelopor dalam pembangunan desa, tetapi juga mendirikan dinasti politik yang kuat dalam struktur pemerintahan desa. Kepemimpinannya menandai awal mula pengaruh keluarganya yang terus berlanjut, di mana kekuasaan politik di desa ini cenderung berpindah dari satu anggota keluarga ke anggota lainnya, menciptakan pola kepemimpinan yang berulang dalam lingkaran keluarga tertentu.

Setelah masa jabatan Atma Wijaya, kepemimpinan dilanjutkan sementara oleh Mahyoto yang merupakan adik sepupunya, dia menjabat dari 1983 hingga 1986. Pergantian ini terjadi akibat masalah kesehatan yang dialami oleh Atma Wijaya, tetapi tetap dalam lingkaran keluarga yang erat. Selanjutnya, Mian, sepupu dari istri Atma Wijaya, terpilih menjadi kepala desa

pada tahun 1986, bertepatan dengan pemilihan kepala desa pertama di Sindangwangi. Hal ini semakin mengukuhkan dominasi keluarga Atma Wijaya dalam politik lokal, di mana kekuasaan terus berpindah di antara anggota keluarga, menciptakan tantangan bagi calon pemimpin lain untuk bersaing secara adil.

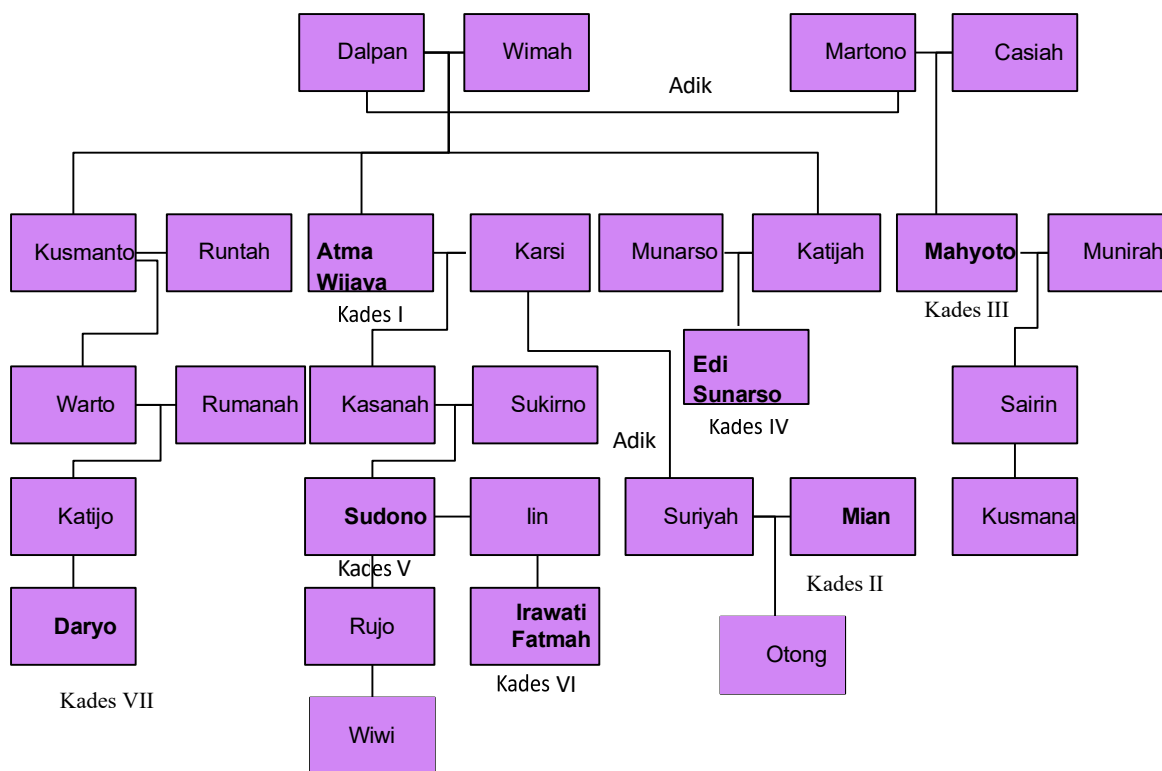
Dari tahun 1990 hingga 2002, kepemimpinan desa kembali dipegang oleh anggota keluarga Atma Wijaya, termasuk Edi Sunarso, keponakan Atma Wijaya, dan Sudono, cucu Atma Wijaya. Dinasti ini terus mempertahankan pengaruhnya dengan membangun jaringan kekuasaan yang kuat dan menjaga dukungan masyarakat melalui hubungan kekerabatan. Strategi yang digunakan oleh keluarga ini termasuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan memberikan jabatan kepada orang-orang yang kritis terhadap kepemimpinan mereka, sehingga menciptakan loyalitas di kalangan pendukung.

Sejak tahun 2002, Irawati Fatmah, adik ipar Sudono, mengambil alih kepemimpinan dan menjabat hingga 2014, kemudian kembali menjabat pada tahun 2020 hingga sekarang. Keberlanjutan kepemimpinan dalam keluarga ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dari calon pemimpin lain, dinasti Atma Wijaya tetap memiliki kekuatan yang signifikan dalam politik desa. Masyarakat sering kali merasa terpaksa untuk mendukung keluarga ini, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena strategi politik yang diterapkan oleh keluarga tersebut.

Secara keseluruhan, dinamika politik di Desa Sindangwangi mencerminkan bagaimana dinasti politik dapat mempengaruhi proses demokrasi di tingkat lokal. Meskipun ada pemilihan kepala desa yang dilakukan, dominasi keluarga Atma Wijaya dalam kepemimpinan desa menunjukkan bahwa partisipasi warga dan dinamika politik lokal sering kali terpengaruh oleh hubungan kekerabatan dan jaringan kekuasaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam proses demokrasi dan tantangan bagi calon pemimpin baru untuk bersaing secara adil di tengah dominasi yang telah ada.

2. Silsilah Keluarga Atma Wijaya

Gambar 3.5 Silsilah Keluarga Atma Wijaya



Sumber: Wawancara Tokoh Masyarakat Desa

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat seorang dukun yang dihormati bernama Dalpan. Ilmunya kemudian diwariskan kepada anaknya, Atma Wijaya yang kelak menjadi kepala desa Sindangwangi pertama. Atma Wijaya dikenal sebagai sosok yang disegani di Kecamatan Bantarkawung berkat kesaktiannya. Popularitasnya tidak hanya terbatas di kalangan masyarakat setempat, tetapi juga menarik perhatian orang-orang dari luar kota, bahkan bupati Brebes pada saat itu pernah mendatangnya untuk meminta pertolongan.

Setelah 50 tahun menjabat sebagai kepala desa, Atma Wijaya memutuskan untuk mengundurkan diri karena faktor usia dan digantikan oleh adik sepupunya, Mahyoto. Namun, Mahyoto hanya menjabat selama tiga tahun sebelum akhirnya digantikan oleh Mian, seorang mantan anggota polisi yang memenangkan Pilkadaes 1986. Meskipun bukan asli daerah tersebut, Mian

memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Atma Wijaya melalui pernikahan, yang membantunya dalam meraih kemenangan. Sayangnya, Mian hanya menjabat selama empat tahun sebelum mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Kepemimpinan desa kemudian diteruskan oleh Edi Sunarso, keponakan Atma Wijaya, yang menyelesaikan sisa masa jabatan selama empat tahun.

Pada Pilkades 1994, awalnya terdapat empat kandidat yang maju, tetapi menjelang penutupan pendaftaran, cucu Atma Wijaya, Sudono, turut mencalonkan diri. Mengetahui hal ini, keempat kandidat lainnya mengundurkan diri, sehingga Sudono terpilih sebagai kepala desa secara aklamasi. Setelah masa jabatannya berakhir, ia menunjuk adik iparnya, Irawati Fatmah, sebagai penggantinya agar dapat fokus pada Pemilihan Caleg 2004. Irawati menjabat selama dua periode sebelum kembali terpilih untuk periode ketiga pada tahun 2020. Sementara itu, Daryo, kakak sepupu Sudono, sempat mencalonkan diri pada Pilkades 2019 dengan dukungan keluarga Atma Wijaya. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disahkan, Irawati Fatmah kembali maju dan didukung oleh Sudono, yang membuat Daryo merasa dikhianati hingga akhirnya memusuhinya. Kejadian ini semakin menegaskan dominasi keluarga Atma Wijaya dalam pemerintahan Desa Sindangwangi, menjadikannya contoh nyata dari dinasti politik di tingkat desa.

3. Jaringan Kekerabatan Atma Wijaya

Dominasi Dinasti Atma Wijaya dalam kepemimpinan Desa Sindangwangi dapat terus bertahan karena jaringan kekerabatan yang sangat luas dan kuat di berbagai aspek pemerintahan desa. Salah satu faktor utama adalah keberadaan keturunan Atma Wijaya yang hampir mencapai 50% dari total populasi desa. Dengan jumlah keluarga yang begitu besar, dukungan terhadap dinasti ini sangat solid, baik dalam pemilihan kepala desa maupun dalam berbagai keputusan politik di tingkat desa. Selain itu, banyak keluarga terdekatnya yang menduduki posisi strategis di pemerintahan desa, seperti kepala dusun (kadus) di Ciheuleut dan Jetak, beberapa perangkat desa, anggota

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mantan sekretaris desa, serta jabatan struktural lainnya. Kondisi ini memberikan keuntungan besar karena kebijakan-kebijakan desa cenderung menguntungkan dan mempertahankan dominasi keluarganya.

Lebih jauh, dinasti Atma Wijaya juga memiliki pengikut setia di setiap dusun, yang tidak hanya mendukung secara politis tetapi juga siap mempertahankan pengaruhnya di tengah masyarakat. Keberadaan loyalis ini memastikan bahwa setiap kebijakan kepala desa yang berasal dari dinasti ini mendapatkan dukungan luas, sekaligus memperkecil kemungkinan munculnya oposisi yang kuat. Selain itu, hubungan kekerabatan yang erat membuat jaringan sosial dan politik dinasti ini semakin sulit ditembus oleh pihak luar. Dengan kombinasi jumlah keturunan yang besar, posisi strategis dalam pemerintahan desa, serta basis loyalis yang kuat, dominasi dinasti Atma Wijaya tetap kokoh dan sulit digeser dari kepemimpinan Desa Sindangwangi.

4. Sumber Kekuatan Keluarga Atma Wijaya

Atma Wijaya mendominasi sebagai Kepala Desa Sindangwangi karena memiliki berbagai sumber kekuatan yang membuatnya berpengaruh dan sulit tergantikan. Dari segi politik, ia memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh penting seperti bupati dan gubernur, yang memberinya akses ke berbagai keuntungan politik. Kedekatan ini mempermudahnya mendapatkan dukungan dalam setiap pemilihan kepala desa serta perlindungan dari berbagai tantangan. Selain itu, ia dapat mengakses program-program pembangunan desa yang semakin mengukuhkan posisinya. Secara ekonomi, Atma Wijaya merupakan salah satu orang terkaya di desa dengan kepemilikan banyak sawah dan aset lainnya yang memberikan stabilitas finansial, sehingga kekayaannya memungkinkannya memberikan bantuan atau pinjaman kepada warga dan menumbuhkan rasa berutang budi di kalangan masyarakat.

Lebih dari itu, Atma Wijaya dikenal sebagai figur terpandang yang dihormati karena kewibawaannya. Banyak warga menjadikannya rujukan dalam pengambilan keputusan, sementara status sosialnya yang tinggi

membuat masyarakat tunduk dan setia kepadanya, baik dalam urusan pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari. Di samping kekuatan politik, ekonomi, dan status sosial, ia juga memiliki pengaruh besar sebagai seorang paranormal yang terkenal hingga ke luar daerah. Kemampuannya dalam hal spiritual dan supranatural membuat banyak orang datang untuk meminta bantuan atau petuah darinya, sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat dan memberikan legitimasi tambahan bagi kepemimpinannya. Kombinasi dari keempat sumber kekuatan ini menjadikan Atma Wijaya sebagai figur yang sangat kuat dan dominan, sehingga posisinya sebagai kepala desa sulit digoyahkan.

Warisan kepemimpinan dan pengaruh Atma Wijaya tampak jelas dalam peran kerabat dan keturunannya di berbagai sektor kehidupan Desa Sindangwangi. Sejak generasi sebelumnya, mereka telah dikenal sebagai tokoh berpengaruh yang meneruskan nilai-nilai kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu penerusnya Sudono yang telah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Brebes sejak tahun 2009 dan berperan penting dalam menyusun kebijakan yang berdampak positif pada masyarakat. Selain itu, Rujo yang mengabdikan dirinya sebagai PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Bantarkawung turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan desa.

Kontribusi keturunan Atma Wijaya tidak hanya terbatas pada bidang politik dan infrastruktur, melainkan juga merambah ke sektor ekonomi, pendidikan, dan kepemudaan. Wiwi, sebagai pengusaha pupuk subsidi, telah mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan menyediakan akses pupuk yang meningkatkan kesejahteraan petani. Di bidang pendidikan, peran Sairin dan Kusmana sebagai guru PNS di SD Sindangwangi menjadi fondasi penting dalam peningkatan kualitas pendidikan, sedangkan Oton, sebagai ketua pemuda desa, menginspirasi semangat kepemudaan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pengalaman Katijo sebagai pensiunan mandor Perhutani pun memberikan nilai praktis yang mendukung hubungan harmonis antara masyarakat dan pembangunan desa. Sinergi dari berbagai kontribusi tersebut

membentuk model kepemimpinan berkelanjutan yang mencerminkan kesinambungan dan kekuatan warisan Atma Wijaya dalam mewujudkan kemajuan Desa Sindangwangi.

BAB IV

PROSES TERBENTUKNYA DINASTI POLITIK ATMA WIJAYA DALAM KEPEMIMPINAN DESA SINDANGWANGI KABUPATEN BREBES

Bab ini bertujuan untuk menganalisis proses terbentuknya dinasti politik Atma Wijaya dalam kepemimpinan Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes, dengan menggambarkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Pembahasan dimulai dari sejarah awal kepemimpinan Atma Wijaya sebagai kepala desa pertama pada tahun 1933, yang menjadi titik awal terbentuknya dinasti politik ini. Analisis mendalam dilakukan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kemunculan dinasti, termasuk hubungan kekerabatan yang kuat, reputasi baik Atma Wijaya sebagai tokoh masyarakat, serta dukungan dari pihak luar, seperti anggota DPRD.

Bab ini juga menjelaskan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh dinasti Atma Wijaya dalam memperkuat kekuasaannya. Penempatan anggota keluarga di posisi strategis pemerintahan desa menjadi salah satu upaya utama dalam mengontrol jalannya politik lokal. Pendekatan personal dan praktik politik uang yang digunakan untuk mempertahankan dukungan masyarakat serta aktor politik lokal turut menjadi fokus kajian, mengungkap dinamika dominasi mereka di tingkat desa. Selain itu, tantangan yang dihadapi oleh dinasti ini, termasuk perlawanan dari aktor politik lain dan hambatan yang dialami calon pemimpin lain untuk bersaing secara adil, juga dianalisis untuk memberikan gambaran yang komprehensif.

Dampak dominasi dinasti politik ini terhadap proses demokrasi di Desa Sindangwangi menjadi bagian integral dari pembahasan. Bab ini mengeksplorasi bagaimana dominasi tersebut memengaruhi partisipasi warga dalam pemilihan kepala desa dan pengambilan keputusan, serta mengidentifikasi potensi hambatan terhadap partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif. Strategi yang digunakan dinasti politik, seperti pengaruh sosial dan intimidasi, dianalisis untuk memahami bagaimana praktik-praktik ini menciptakan ketidakadilan dalam proses demokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik lokal.

Melalui kajian ini, pembaca diharapkan dapat memahami bagaimana hubungan kekerabatan, jaringan sosial, dan budaya lokal memengaruhi akumulasi kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok. Analisis ini tidak hanya relevan untuk memahami dinamika kekuasaan di Desa Sindangwangi, tetapi juga dapat menjadi referensi dalam memahami fenomena serupa di daerah lain. Dengan demikian, bab ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang operasi kekuasaan lokal dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang spesifik, serta menawarkan landasan bagi penelitian lebih lanjut tentang politik lokal di Indonesia.

A. Proses Awal Terbentuknya Dinasti Politik Atma Wijaya

1. Sejarah Awal Keterlibatan Keluarga Atma Wijaya dalam Politik Desa

Sejarah awal keterlibatan keluarga Atma Wijaya dalam politik Desa Sindangwangi dimulai dengan Atma Wijaya yang menjabat sebagai kepala desa pertama pada tahun 1933. Sebagai pemimpin awal, Atma Wijaya tidak hanya meletakkan fondasi bagi pembangunan desa, tetapi juga membangun reputasi sebagai tokoh masyarakat yang dihormati dan disegani. Kepemimpinannya berlangsung selama lima dekade, di mana ia berhasil mengembangkan hubungan yang kuat dengan masyarakat dan menciptakan kepercayaan yang mendalam terhadap kepemimpinannya, hal ini diperkuat dari pernyataan Suklim: "Atma Wijaya yang menjabat sebagai Kepala Desa Sindangwangi pada periode 1933-1983, menjadi pelopor awal terbentuknya dinasti politik di desa tersebut." (Wawancara Suklim, 27 November 2024).

Setelah masa jabatan Atma Wijaya berakhir pada tahun 1983, kepemimpinan Desa Sindangwangi dilanjutkan oleh Mahyoto, yang merupakan adik sepupu Atma Wijaya. Pergantian ini menunjukkan bahwa kekuasaan tetap berada dalam lingkaran keluarga yang erat, meskipun terjadi perubahan pemimpin. Selanjutnya, Mian, sepupu dari istri Atma Wijaya, terpilih menjadi kepala desa pada tahun 1986, bertepatan dengan pemilihan kepala desa (Pilkades) pertama di desa tersebut. Proses ini semakin mengukuhkan pengaruh keluarga Atma Wijaya dalam politik lokal, di mana kekuasaan terus berpindah dari satu anggota keluarga ke anggota lainnya, hal

ini diperkuat oleh pernyataan dari Daryo: "Dinasti politik di tingkat desa sering kali menciptakan pola kepemimpinan yang terus berulang di dalam lingkaran keluarga Atma Wijaya, pilkades berikutnya saja dari keluarga Atma Wijaya, Rujo yang akan maju." (Wawancara Daryo, 30 November 2024).

Keterlibatan keluarga Atma Wijaya dalam politik desa tidak hanya terbatas pada jabatan kepala desa, tetapi juga meliputi posisi strategis lainnya dalam pemerintahan desa. Anggota keluarga lainnya, seperti Edi Sunarso dan Sudono, yang merupakan keponakan dan cucu Atma Wijaya, juga menjabat sebagai kepala desa di periode berikutnya. Dengan penempatan anggota keluarga di berbagai posisi penting, dinasti Atma Wijaya berhasil membangun jaringan kekuasaan yang kuat, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan memperkuat pengaruh politik mereka di Desa Sindangwangi. Hal ini menciptakan dinamika politik yang kompleks, di mana keputusan-keputusan penting sering kali dipengaruhi oleh kepentingan keluarga yang menunjukkan betapa dalamnya pengaruh mereka terhadap struktur politik lokal, sebagaimana pernyataan dari Katijo: "Keluarga Atma Wijaya mempunyai jaringan keluarga hampir 50% di desa Sindangwangi." (Wawancara Katijo, 30 November 2024).

Dalam konteks dominasi politik keluarga Atma Wijaya di Desa Sindangwangi, terdapat beberapa peristiwa penting yang menjadi titik balik dalam memperkuat kekuasaan mereka. Salah satu momen krusial adalah pemilihan kepala desa pertama pada tahun 1986, di mana Mian, sepupu dari istri Atma Wijaya, terpilih sebagai kepala desa. Peristiwa ini menandai transisi dari kepemimpinan tradisional ke sistem pemilihan yang lebih formal, namun tetap mempertahankan kekuasaan dalam lingkaran keluarga Atma Wijaya, hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Daryo: "Pergantian ini terjadi karena masalah kesehatan yang dialami oleh Atma Wijaya, tetapi tetap dalam lingkaran keluarga yang erat." (Wawancara Daryo, 30 November 2024).

Keberlanjutan dominasi keluarga ini juga didukung oleh jaringan kekuasaan yang mereka bangun di tingkat lokal. Anggota keluarga Atma Wijaya ditempatkan di posisi strategis di berbagai dusun yang memperluas

pengaruh politik mereka di seluruh Desa Sindangwangi. Seperti yang disebutkan oleh Suklim: “Jaringan kekuasaannya dibangun dari keluarganya yang ada di setiap dusun di desa Sindangwangi.” (Wawancara Suklim, 27 November 2023). Strategi ini tidak hanya mempertahankan kontrol atas politik desa, tetapi juga menciptakan stabilitas internal yang sulit digoyahkan oleh aktor politik lain. Dengan demikian, momen-momen ini menjadi *critical juncture* yang memperkuat dominasi keluarga Atma Wijaya dalam politik lokal, menciptakan pola kepemimpinan yang berulang dan memastikan keberlanjutan kekuasaan mereka di Desa Sindangwangi.

2. Motivasi Awal Pembentukan Dinasti Atma Wijaya

Keluarga Atma Wijaya memiliki berbagai kepentingan ekonomi, sosial, dan politik yang mendorong mereka untuk terlibat dalam struktur pemerintahan desa Sindangwangi. Secara ekonomi, keterlibatan dalam pemerintahan desa memberikan akses kepada keluarga ini untuk mengelola sumber daya dan anggaran desa, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis dan investasi mereka. Dengan posisi strategis dalam pemerintahan, mereka dapat mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan alokasi dana, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kekayaan keluarga, sebagaimana dijelaskan oleh Suklim dan Daryo: "Sudono yang merupakan mantan kepala desa mempunyai toko kelontong, biasanya menukarkan uang dari bansos dengan kebutuhan pokok masyarakat." (Wawancara Suklim, 27 November 2024).

“Rujo yang merupakan adik dari Sudono bekerja sebagai PNS dari PUPR dan sering memperbaiki jalan di desa Sindangwangi, akan tetapi dana yang dikeluarkan pemerintah tidak pernah sesuai dengan hasil yang didapatkan masyarakat.” (Wawancara Daryo, 30 November 2024).

Dari segi sosial, keterlibatan dalam pemerintahan desa juga memberikan legitimasi dan status kepada keluarga Atma Wijaya di mata masyarakat. Dengan menjadi pemimpin, mereka dapat membangun citra positif sebagai tokoh masyarakat yang peduli dan berkontribusi terhadap kesejahteraan desa. Hal ini penting untuk mempertahankan dukungan masyarakat, yang

merupakan kunci untuk kelangsungan kekuasaan mereka. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara mantan sekdes:

"Strategi yang digunakan untuk menjaga dukungan masyarakat dan aktor politik lokal adalah dengan menjaga komunikasi dari tiap perangkat desa, masyarakat, dan tokoh masyarakat." (Wawancara Ramidi, 27 November 2024).

Secara politik, keterlibatan dalam pemerintahan desa memungkinkan keluarga Atma Wijaya untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh politik mereka. Dengan mengendalikan posisi-posisi kunci dalam pemerintahan desa, mereka dapat mengatur jaringan dukungan yang kuat dan mengelola hubungan dengan aktor politik lainnya, termasuk pemerintah daerah. Hal ini menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi mereka untuk terus berkuasa dan menghindari tantangan dari calon pemimpin lain, hal ini diperjelas oleh pernyataan dari Suklim dan Kustoro:

"Sudono yang merupakan dalang dalam pencalonan keluarganya membuat strategi politik untuk menarik ketua tim sukses dari lawan politiknya supaya menjadi bawahannya yang kemudian dia berikan posisi strategis di desa. Bahkan BPD nya pun ditunjuk sendiri oleh dia, sehingga dalam rapat desa BPD hanya manut pada hasil rapat tersebut." (Wawancara Suklim, 27 November 2024).

"Saat pilkades 2019, Sudono menjadikan beberapa saudara saya mata mata dalam setiap kumpulan. Kemudian anak-anak yang saya ajarin mengaji juga sampai bubar karena Ibu dari mereka tidak memilih Adik saya." (Wawancara Kustoro, 1 Desember 2024).

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Dinasti Politik

1. Peran Institusi Desa dalam Membentuk Dominasi Politik

Institusi tradisional dan formal di tingkat desa Sindangwangi memberikan peluang yang signifikan bagi dinasti Atma Wijaya untuk berkembang dan mempertahankan kekuasaan mereka. Institusi tradisional seperti sistem kekerabatan dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat desa, memberikan dukungan yang kuat bagi keluarga ini. Hubungan kekerabatan yang erat memungkinkan mereka untuk membangun jaringan dukungan yang solid di antara warga desa, ini sebagaimana diperkuat oleh pernyataan Kustoro: "Peran hubungan kekerabatan dalam memperkuat pengaruh politik keluarga ini sangat besar." (Wawancara Kustoro, 1 Desember

2024). Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan keluarga dan hubungan sosial yang kuat menjadi modal utama bagi dinasti ini untuk mempertahankan pengaruhnya.

Institusi formal seperti pemerintahan desa dan proses pemilihan kepala desa juga memberikan peluang bagi dinasti Atma Wijaya untuk mengukuhkan kekuasaan mereka. Dengan memiliki anggota keluarga yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan desa, mereka dapat memanfaatkan kekuasaan tersebut untuk mengontrol alur kebijakan dan pengambilan keputusan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ramidi: "Jaringan kekuasaannya dibangun dari keluarganya yang ada di setiap dusun di desa Sindangwangi, beberapa dari keluarganya merupakan kepala dusun seperti Ciheuleut dan Jetak." (Wawancara Ramidi, 27 November 2024).

Selain itu, proses pemilihan kepala desa yang berlangsung di desa juga sering kali dipengaruhi oleh kekuatan dinasti ini. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan kepemimpinan keluarga Atma Wijaya cenderung memberikan dukungan kepada calon dari keluarga tersebut yang menciptakan siklus kekuasaan yang sulit diputus. Hal ini menunjukkan bahwa institusi formal dalam hal ini pemilihan tidak hanya menjadi mekanisme demokratis, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat dominasi dinasti yang sudah ada. Dalam wawancara, salah satu mantan kepala desa menyatakan bahwa: "Keberadaan dinasti politik memengaruhi partisipasi warga dalam pemilihan kepala desa." (Wawancara Daryo, 30 November 2024).

Dinasti Atma Wijaya memanfaatkan institusi tradisional seperti sistem kekerabatan dan norma sosial untuk mempertahankan pengaruh politik mereka. Seiring waktu, hubungan kekerabatan yang kuat menjadi modal sosial yang melembaga dan menciptakan warisan politik yang sulit dipatahkan. Selain itu, interaksi antara institusi formal dan informal juga memainkan peran penting dalam mempertahankan dominasi politik keluarga ini. Steinmo menekankan bahwa institusi formal, seperti pemerintahan desa dan pemilihan kepala desa, tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan norma sosial dan jaringan kekeluargaan yang telah mengakar. Hal ini membuat proses

pemilihan tidak hanya sekadar mekanisme demokratis, tetapi juga alat untuk memperkuat kekuasaan dinasti. Struktur institusi dalam pemerintahan desa memberikan keuntungan bagi aktor tertentu, dalam hal ini keluarga Atma Wijaya, yang menempatkan anggota keluarganya di posisi strategis untuk mengontrol kebijakan dan memperkuat jaringan kekuasaan. Kondisi ini menciptakan stabilitas bagi dinasti tersebut karena setiap generasi memiliki akses terhadap sumber daya politik yang sama. Lebih jauh, teori ini juga menjelaskan bagaimana institusi yang telah terbentuk dapat menciptakan hambatan bagi perubahan. Masyarakat yang telah terbiasa dengan kepemimpinan keluarga Atma Wijaya cenderung tetap memberikan dukungan kepada calon dari dinasti tersebut, sehingga menciptakan siklus kekuasaan yang sulit diputus. Dengan demikian, teori *historical institutionalism* menjelaskan bagaimana kekuasaan dinasti ini bukan hanya hasil dari strategi individu, tetapi juga warisan institusional yang memberikan keuntungan struktural bagi mereka dan membentuk pola yang sulit diubah.

2. Pengaruh Budaya dan *Kinship* dalam Politik Desa

Dinasti Atma Wijaya di Desa Sindangwangi memiliki hubungan kekerabatan yang sangat berperan dalam memperkuat posisi politik keluarga ini. Keluarga Atma Wijaya tidak hanya mengandalkan hubungan darah, tetapi juga membangun aliansi strategis melalui pernikahan dengan keluarga-keluarga lain yang berpengaruh di desa. Ini menunjukkan bahwa kekuatan politik keluarga Atma Wijaya tidak hanya berasal dari anggota keluarga inti, tetapi juga dari hubungan yang terjalin dengan keluarga lain melalui pernikahan. Dengan cara ini, mereka dapat memperluas pengaruh dan dukungan politik mereka, menciptakan ikatan yang saling menguntungkan. Hal ini menciptakan jaringan yang lebih luas dan memperkuat legitimasi mereka di mata masyarakat, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Suklim:

"Jaringan kekuasaan dibangun berdasarkan keluarga besar, dimana setiap keluarga menikah dengan keluarga lain dalam satu desa, sehingga keluarga Atma Wijaya menjadi semakin besar di desa Sindangwangi." (Wawancara Suklim, 27 November 2024).

Selain itu, pernikahan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Melalui pernikahan, keluarga Atma Wijaya dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa, sehingga memudahkan mereka dalam mengelola dukungan politik. Dalam wawancara dengan mantan sekretaris desa, dijelaskan bahwa: "Strategi yang digunakan untuk menjaga dukungan masyarakat dan aktor politik lokal adalah dengan menjaga komunikasi dari tiap perangkat desa, masyarakat, dan tokoh masyarakat." (Wawancara Ramidi, 27 November 2024).

Keterikatan kekerabatan ini juga menciptakan dinamika di mana anggota keluarga dapat saling mendukung dalam pemilihan kepala desa. Ini membuat hubungan kekerabatan tidak hanya berfungsi untuk memperkuat posisi politik, tetapi juga untuk mempengaruhi keputusan pemilih di tingkat lokal. Seperti yang diungkapkan dalam wawancara bersama Darto: "Perangkat desa dan kadus nya keluarganya jadi bisa mengkondisikan masyarakat untuk memilihnya." (Wawancara Darto, 1 Desember 2024).

Fleksibilitas struktur sosial keluarga Atma Wijaya di Desa Sindangwangi sangat penting dalam memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan dinamika politik yang terus berubah. Keluarga ini memiliki jaringan kekerabatan yang luas, dengan anggota keluarga yang menduduki berbagai posisi strategis di desa, sehingga mereka dapat mengakses sumber daya dan dukungan politik yang diperlukan, hal ini diperkuat oleh pernyataan Ramidi: "Jaringan kekuasaan dibangun dari keluarganya yang ada di setiap dusun di desa Sindangwangi." (Wawancara Ramidi, 27 November 2024). Dengan demikian keberadaan anggota keluarga di berbagai posisi memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi politik.

Selain itu, keluarga Atma Wijaya menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lanskap politik lokal. Mereka mengubah pendekatan komunikasi dengan masyarakat dan tokoh politik lokal sesuai dengan kebutuhan yang ada, dalam strategi komunikasi ini memungkinkan mereka untuk tetap relevan dan mendapatkan dukungan meskipun ada perubahan dalam preferensi politik masyarakat. Seperti penjelasan dari

Ramidi: "Strategi yang digunakan untuk menjaga dukungan masyarakat dan aktor politik lokal adalah dengan menjaga komunikasi dari tiap perangkat desa, masyarakat, dan tokoh masyarakat." (Wawancara Ramidi, 27 November 2024).

Keluarga ini juga mampu membangun aliansi strategis dengan keluarga atau tokoh lain di desa, menciptakan sinergi yang memperkuat posisi mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bergantung pada kekuatan internal, tetapi juga pada hubungan eksternal yang dapat memberikan dukungan tambahan. Ketika menghadapi tantangan dari calon pemimpin lain, keluarga Atma Wijaya menunjukkan kemampuan untuk merespons dengan cepat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Suklim:

"Jaringan antara setiap keluarga itu ada, tidak harus dari keluarganya karena banyak dari keluarga bawahan Sudono yang siap memenangkan calon dari keluarga Atma Wijaya. Sulit untuk menggulingkan dinasti Atma Wijaya karena Sudono yang menjadi dalang kemenangan keluarga Atma Wijaya masih hidup, mungkin keluarga Atma Wijaya bisa tumbang setelah Sudono meninggal." (Wawancara Suklim, 27 November 2024).

3. Kepentingan Ekonomi dan Modal Sosial

Modal sosial keluarga Atma Wijaya di Desa Sindangwangi dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung kepemimpinan desa melalui jaringan relasi yang kuat dan keterlibatan aktif dalam komunitas. Modal sosial ini mencakup hubungan baik dengan masyarakat, tokoh lokal, dan perangkat desa, yang memungkinkan keluarga ini untuk membangun kepercayaan dan dukungan yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan, sebagaimana diperkuat oleh pernyataan dari Sudono: "Keterbukaan dan kinerja yang baik menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap keluarga kami dalam kepemimpinan desa." (Wawancara Sudono, 30 November 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Atma Wijaya tidak hanya mengandalkan posisi mereka, tetapi juga berusaha untuk terlibat secara langsung dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan memberikan solusi yang relevan.

Selain itu, keluarga ini juga memanfaatkan modal sosial mereka untuk menggalang dukungan dalam pemilihan kepala desa, hal ini diperkuat oleh

pernyataan Rujo selaku calon kepala desa Sindangwangi periode mendatang: "Setiap kali ada pemilihan, kami selalu melibatkan keluarga besar untuk mendukung calon yang diusung." (Wawancara Rujo, 1 Desember 2024). Ini menunjukkan bahwa mereka menggunakan jaringan keluarga yang luas untuk memobilisasi suara dan menciptakan konsensus di antara pemilih. Dengan cara ini, modal sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan mereka di mata masyarakat.

Keluarga Atma Wijaya juga menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik yang ada. Mereka sering melakukan silaturahmi dan berinteraksi dengan masyarakat, yang membantu mereka untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan warga, hal ini diperkuat oleh penjelasan dari Rujo: "Saya sering silaturahmi dengan masyarakat, sehingga mereka merasa dekat dan percaya kepada saya." (Wawancara Rujo, 1 Desember 2024). Dengan memanfaatkan modal sosial ini, keluarga Atma Wijaya tidak hanya mampu mempertahankan posisi mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan desa secara keseluruhan, menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara kepemimpinan dan masyarakat.

C. Langkah-Langkah Penguatan Kekuasaan oleh Dinasti Atma Wijaya

1. Strategi Politik Keluarga Atma Wijaya

Konsolidasi kekuasaan keluarga Atma Wijaya di Desa Sindangwangi dilakukan melalui penguatan jaringan politik dan ekonomi yang saling mendukung. Jaringan politik yang dibangun oleh keluarga ini melibatkan hubungan erat dengan berbagai tokoh masyarakat, perangkat desa, dan anggota legislatif, yang memungkinkan mereka untuk mengakses sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan, hal ini diperkuat oleh pernyataan Ramidi: "Jaringan kekuasaan dibangun dari

keluarganya yang ada di setiap dusun di desa Sindangwangi." (Wawancara Ramidi, 27 November 2024).

Di sisi lain, konsolidasi kekuasaan juga didukung oleh jaringan ekonomi yang kuat. Keluarga Atma Wijaya memanfaatkan sumber daya ekonomi mereka untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Misalnya, mereka sering terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada warga, seperti program bantuan atau pengembangan infrastruktur. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Daryo: "Keluarga Atma Wijaya selalu berusaha untuk membantu masyarakat dalam hal ekonomi, sehingga mereka merasa memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya." (Wawancara Daryo, 30 November 2024). Dengan cara ini, mereka tidak hanya membangun dukungan politik, tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi yang memperkuat posisi mereka.

Konsolidasi kekuasaan ini juga terlihat dalam strategi mereka untuk menghadapi tantangan dari calon pemimpin lain. Keluarga Atma Wijaya menggunakan jaringan politik mereka untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman, serta mencari dukungan dari tokoh-tokoh kunci di desa. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Daryo: "Keluarga Atma Wijaya selalu mencari cara untuk menjaga dukungan dari tokoh masyarakat dan perangkat desa agar tidak ada yang berani menantang posisi keluarganya." (Wawancara Daryo, 30 November 2024).

Upaya keluarga Atma Wijaya dalam mempertahankan legitimasi kepemimpinan mereka di Desa Sindangwangi dilakukan melalui berbagai program desa dan aktivitas sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga. Keluarga ini menyadari bahwa untuk tetap mendapatkan dukungan dari masyarakat, mereka harus aktif terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada warga desa. Sebagaimana pernyataan dari Daryo: "Keluarga Atma Wijaya selalu berusaha untuk membantu masyarakat dalam hal ekonomi, sehingga mereka merasa memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya." (Wawancara Daryo, 30 November 2024).

Program-program yang dilaksanakan oleh keluarga Atma Wijaya sering kali mencakup bantuan sosial, pengembangan infrastruktur, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Misalnya, mereka terlibat dalam pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan tempat ibadah, yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan desa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Daryo: "Setiap kali ada proyek pembangunan, keluarga Atma Wijaya selalu terlibat dan membantu, sehingga masyarakat merasa diperhatikan." (Wawancara Daryo, 30 November 2024).

2. Peran Anggota Keluarga dalam Struktur Pemerintahan Desa

Pembagian peran strategis di antara anggota keluarga Atma Wijaya di Desa Sindangwangi menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kekuasaan dan legitimasi politik mereka. Setiap anggota keluarga memainkan peran yang spesifik dan saling melengkapi, memungkinkan pengelolaan kekuasaan yang efektif dan efisien. Dalam struktur ini, salah satu anggota keluarga biasanya berperan sebagai pemimpin utama, seperti kepala desa atau calon kepala desa, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan menjadi representasi publik keluarga, sebagaimana diperkuat oleh pernyataan dari Rujo: "Keluarga kami selalu memiliki satu orang yang menjadi kepala desa, dan dia yang menjadi juru bicara untuk kepentingan keluarga." (Wawancara Rujo, 1 Desember 2024).

Selain itu, anggota keluarga lainnya mengambil peran pendukung, seperti mengelola program-program desa, menjalin hubungan dengan masyarakat, dan mengorganisasi acara-acara sosial, hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Rujo: "Kami semua memiliki tugas masing-masing, ada yang mengurus program sosial, ada yang berhubungan dengan tokoh masyarakat." (Wawancara Rujo, 1 Desember 2024). Pembagian tugas ini memastikan bahwa aspek operasional dan administratif kepemimpinan berjalan lancar. Beberapa anggota keluarga juga membangun dan memelihara jaringan politik dengan tokoh-tokoh berpengaruh, seperti anggota DPRD atau pejabat

pemerintah lainnya, guna memastikan dukungan bagi program-program desa, sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan Rujo: “Kami memiliki keluarga yang menjadi anggota DPRD yaitu Sudono, dan itu sangat membantu dalam mendapatkan dukungan untuk proyek-proyek kami.” (Wawancara Rujo, 1 Desember 2024).

Keterlibatan tokoh-tokoh keluarga dalam mendukung kebijakan kepala desa di Desa Sindangwangi memainkan peran yang signifikan dalam memperkuat legitimasi dan efektivitas kepemimpinan. Tokoh-tokoh keluarga, yang sering kali menduduki posisi strategis dalam struktur sosial dan politik desa, berfungsi sebagai penghubung antara kepala desa dan masyarakat. Mereka membantu menyampaikan kebijakan dan program yang diusulkan oleh kepala desa, sekaligus memastikan bahwa informasi tersebut diterima dan dipahami oleh warga. Peran ini tidak hanya mendukung implementasi kebijakan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut terlihat dalam komunikasi intensif antara kepala desa dan anggota keluarga yang juga berperan sebagai tokoh masyarakat. Melalui kegiatan seperti silaturahmi dan pertemuan warga, mereka menjelaskan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa serta mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. Upaya ini tidak hanya meningkatkan transparansi kebijakan, tetapi juga memberikan kesan bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, seperti yang dijelaskan oleh Rujo: "Kami selalu berusaha untuk menjelaskan kebijakan kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh keluarga, agar mereka merasa dilibatkan." (Wawancara Rujo, 1 Desember 2024).

Selain itu, tokoh-tokoh keluarga juga memiliki pengaruh besar dalam menggalang dukungan untuk kebijakan yang diusulkan oleh kepala desa. Pengaruh mereka sering dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat mendukung program-program desa, termasuk dalam konteks pemilihan kepala desa. Misalnya, keterlibatan tokoh keluarga dalam perangkat desa atau posisi strategis lainnya dapat mengarahkan masyarakat untuk memilih calon yang diusung oleh keluarga, sehingga memperkuat posisi kepala desa yang sedang

menjabat, hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Darto: "Karena perangkat desa dan kadusnya adalah keluarga, mereka bisa mengkondisikan masyarakat untuk memilih." (Wawancara Darto, 1 Desember 2024).

Keterlibatan ini juga mencakup proses pengambilan keputusan yang bersifat internal. Kebijakan yang diusulkan oleh kepala desa sering kali dibahas terlebih dahulu dengan anggota keluarga yang memiliki pengalaman atau keahlian di bidang tertentu. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mempertimbangkan masukan dari berbagai perspektif dalam keluarga. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih matang dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi antara kepemimpinan formal kepala desa dan dukungan sosial dari tokoh-tokoh keluarga, keterlibatan mereka menjadi elemen penting dalam keberhasilan program-program pembangunan desa. Hal ini juga berkontribusi pada stabilitas politik lokal, sekaligus memperkuat posisi keluarga dalam struktur kekuasaan di Desa Sindangwangi.

3. Pengelolaan Konflik oleh Keluarga Atma Wijaya

Penanganan konflik politik yang muncul akibat dominasi dinasti Atma Wijaya di Desa Sindangwangi dapat dijelaskan melalui beberapa aspek yang saling berkaitan, seperti yang terungkap dalam penelitian dan wawancara. Salah satu elemen kunci adalah jaringan keluarga dan dukungan. Dinasti Atma Wijaya memiliki jaringan keluarga yang kuat di setiap dusun di desa, yang berfungsi untuk mengkondisikan masyarakat agar tetap mendukung calon-calon dari keluarga tersebut. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan Ramidi: "Jaringan kekuasaannya dibangun dari keluarganya yang ada di setiap dusun di desa Sindangwangi." (Wawancara Ramidi, 27 November 2024).

Selain itu, strategi politik untuk menjaga dukungan juga menjadi alat penting yang digunakan oleh dinasti ini. Mereka menjaga komunikasi dengan masyarakat dan memastikan anggota keluarga menduduki posisi strategis dalam pemerintahan desa. Sebagaimana dinyatakan oleh Ramidi: "Strateginya yaitu dengan menjaga komunikasi dari tiap perangkat desa, masyarakat, dan

tokoh masyarakat." (Wawancara Ramidi, 27 November 2024). Strategi ini tidak hanya mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat tetapi juga memperkuat kontrol dinasti atas struktur sosial dan politik desa.

Namun, dinasti Atma Wijaya juga menggunakan intimidasi dan pengaruh untuk menekan pihak-pihak yang menentang dominasi mereka. Intimidasi ini sering kali diarahkan kepada keluarga yang tidak mendukung, seperti yang diungkapkan dalam pernyataan Kustoro: "Keluarga Atma Wujaya sering mengintimidasi keluarga yang tidak memilihnya." (Wawancara Kustoro, 1 Desember 2024). Praktik ini menciptakan suasana persaingan yang tidak adil, sehingga menyulitkan calon lain untuk bersaing secara setara.

Di sisi lain, dinasti ini juga memiliki cara untuk merespons tantangan politik dari aktor lain dengan merekrut kader lawan menjadi bagian dari struktur pendukung mereka. Strategi ini diungkapkan melalui pernyataan Kustoro: "Setiap pilkades keluarga Atma Wijaya selalu mencari kader-kader dari calon lawannya untuk ditugaskan menjadi penyusup." (Wawancara Kustoro, 1 Desember 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa dinasti Atma Wijaya tidak hanya mempertahankan dominasi melalui tekanan, tetapi juga melalui pengelolaan konflik yang strategis.

Selain itu, pengaruh terhadap partisipasi warga dalam pemilihan kepala desa menjadi salah satu bentuk nyata dominasi dinasti ini. Dengan perangkat desa yang sebagian besar berasal dari keluarga mereka, dinasti Atma Wijaya mampu mengarahkan masyarakat untuk mendukung calon yang diusung, hal ini tercermin dalam pernyataan Darto: "Karena perangkat desa dan kadusnya keluarganya jadi bisa mengkondisikan masyarakat untuk memilihnya." (Wawancara Darto, 1 Desember 2024). Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan, tetapi juga memicu potensi konflik antarwarga yang berbeda pandangan.

Dengan saling terhubungnya elemen-elemen tersebut, dominasi dinasti Atma Wijaya di Desa Sindangwangi terlihat terstruktur melalui kombinasi jaringan keluarga, strategi politik, intimidasi, perekrutan kader lawan, serta

pengaruh pada partisipasi warga. Hal ini menjadikan konflik politik di desa tersebut sebagai persoalan yang kompleks dan penuh tantangan.

D. Dinamika dalam Mempertahankan Kekuasaan

1. Respon Masyarakat Terhadap Dinasti Politik

Pandangan masyarakat terhadap dominasi keluarga Atma Wijaya di Desa Sindangwangi mencerminkan berbagai perspektif yang beragam, baik positif maupun negatif, yang saling berkaitan dalam membentuk dinamika politik desa. Penerimaan dan dukungan terhadap dinasti Atma Wijaya menjadi salah satu pandangan yang muncul di masyarakat. Sebagian warga menganggap keberadaan keluarga ini memberikan kontribusi positif bagi desa, terutama dalam hal stabilitas dan pengaruh yang kuat. Namun, dukungan ini disertai dengan harapan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Suklim: "Bukan dinasti politik, soalnya kan dipilih oleh rakyat. Tapi pesan saya jangan sering menyalahgunakan kekuasaan, keluarga Atma Wijaya dari dulu emang sering menyalahgunakan kekuasaan." (Wawancara Suklim, 27 November 2024).

Di sisi lain, ketergantungan masyarakat pada keluarga Atma Wijaya juga menjadi sorotan. Sebagian warga merasa ada tekanan sosial untuk mendukung calon dari dinasti tersebut, yang menciptakan perasaan tidak bebas dalam menentukan pilihan politik. Suklim menyatakan bahwa: "Masyarakat dipaksa mendukung keluarganya oleh Atma Wijaya supaya bias terus menjabat jadi kepala desa." (Wawancara Suklim, 27 November 2024). Tekanan ini menciptakan ketidakpuasan, terutama di kalangan warga yang tidak setuju dengan praktik tersebut, sehingga meningkatkan kompleksitas hubungan antara masyarakat dan keluarga penguasa.

Kritik terhadap praktik politik dinasti Atma Wijaya juga mengemuka, terutama terkait pengaruh mereka yang dianggap menghambat proses demokrasi yang sehat. Kritik ini menyoroti bagaimana dominasi keluarga ini melibatkan campur tangan dari pihak luar yang memiliki pengaruh besar. Seperti yang diungkapkan oleh Kustoro: "Pasti ada hambatan untuk

mencalonkan diri menjadi kepala desa, karena adanya campur tangan dari Sudono yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Brebes." (Wawancara Kustoro, 1 Desember 2024).

Dalam kaitannya dengan demokrasi, muncul persepsi yang beragam mengenai apakah dominasi ini melanggar nilai-nilai demokrasi. Beberapa warga merasa bahwa dominasi ini sah karena kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat, seperti pernyataan dari Ramidi: "Tidak melanggar aturan, karena yang memilih itu masyarakat dan bukan ditunjuk langsung" (Wawancara Ramidi, 27 November 2024). Namun, pandangan ini diimbangi oleh kritik yang menyoroti adanya intimidasi dalam proses politik, seperti pernyataan dari Daryo sebagai mantan kepala desa Sindangwangi, beliau menyatakan bahwa: "Adanya campur tangan dari keluarga Atma Wijaya pasti melanggar demokrasi, walaupun dipilih oleh rakyat tapi masih ada intimidasi dari keluarga Atma Wijaya." (Wawancara Daryo, 30 November 2024).

Meski demikian, masyarakat juga memiliki harapan untuk perubahan dalam struktur kekuasaan. Ada keinginan untuk membuka peluang bagi calon pemimpin lain yang lebih adil dan transparan. Pemimpin yang bisa menyerap aspirasi masyarakat untuk membebaskan sistem politik desa dari keterikatan pada dinasti tertentu. Harapan ini mencerminkan keinginan warga untuk menciptakan iklim politik yang lebih inklusif dan demokratis, sebagaimana diungkapkan oleh Sutamto: "Ya siapa saja bisa maju sebagai kepala desa dong, bukan hanya dari keturunan Atma Wijaya saja, tapi semua masyarakat Desa Sindangwangi bebas untuk mengikuti pemilihan kepala desa." (Wawancara Sutamto, 1 Desember 2024).

Namun, dominasi keluarga Atma Wijaya tetap memberikan dampak besar terhadap partisipasi warga dalam pemilihan kepala desa. Dengan banyaknya perangkat desa yang berasal dari keluarga tersebut, masyarakat sering merasa tertekan untuk mendukung calon dari dinasti ini. Hal ini diungkapkan oleh Darto: "Karena perangkat desa dan kadusnya keluarganya jadi bisa mengkondisikan masyarakat untuk memilihnya." (Wawancara Darto, 1 Desember 2024). Tekanan ini berdampak pada kualitas partisipasi warga,

menciptakan kondisi yang kurang kondusif untuk pelaksanaan demokrasi yang bebas dan adil.

Secara keseluruhan, pandangan masyarakat terhadap dominasi keluarga Atma Wijaya di Desa Sindangwangi menunjukkan dinamika yang kompleks. Penerimaan, ketergantungan, kritik terhadap praktik politik, persepsi tentang pelanggaran demokrasi, harapan untuk perubahan, dan dampak terhadap partisipasi warga saling terkait dalam menggambarkan hubungan antara masyarakat dan dinasti tersebut. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi desa dalam menciptakan struktur politik yang lebih inklusif dan demokratis.

2. Penyesuaian Strategi Dinasti dalam Menghadapi Tantangan Politik dan Sosial

Fleksibilitas dalam struktur sosial di Desa Sindangwangi menggambarkan bagaimana hubungan kekerabatan menjadi faktor yang signifikan dalam memengaruhi dinamika kekuasaan dan partisipasi politik. Dalam konteks ini, hubungan kekerabatan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan sosial, tetapi juga dimanfaatkan sebagai alat strategis untuk mempertahankan dan memperkuat posisi politik. Keluarga Atma Wijaya yang mendominasi kepemimpinan desa secara aktif memanfaatkan jaringan kekerabatan mereka untuk mengkondisikan dukungan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Darto:

"Keluarga Atma Wijaya jelas bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat, karena perangkat desa dan kadusnya saja kan dari keluarganya. Jadi sangat bisa mengkondisikan masyarakat untuk memilihnya." (Wawancara Darto, 1 Desember 2024).

Selain itu, Fleksibilitas dalam struktur sosial keluarga Atma Wijaya tidak hanya tercermin dalam cara mereka mengelola jaringan kekuasaan di Desa Sindangwangi, tetapi juga dalam strategi yang mereka terapkan untuk menghadapi persaingan politik. Kemampuan mereka dalam merespons dinamika politik lokal menunjukkan tingkat adaptasi yang tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan dari calon pemimpin lain. Salah satu strategi

yang digunakan adalah merekrut kader dari pihak lawan untuk menjadi penyusup, sehingga memperkuat posisi mereka di tengah kompetisi politik yang berlangsung. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk meredam potensi ancaman, tetapi juga memperluas pengaruhnya dalam struktur politik desa. Dengan demikian, fleksibilitas sosial yang mereka bangun menjadi faktor utama yang memungkinkan dinasti politik Atma Wijaya untuk terus bertahan dan berkembang meskipun menghadapi berbagai tekanan eksternal dan internal. Seperti yang disampaikan oleh Kustoro: “Mereka menggunakan strategi seperti merekrut kader dari calon lawan untuk menjadi penyusup, sehingga memperkuat posisi mereka di tengah kompetisi politik yang ada” (Wawancara Kustoro, 1 Desember 2024).

Dalam kasus Desa Sindangwangi, fleksibilitas struktur sosial memungkinkan keluarga Atma Wijaya untuk mengintegrasikan jaringan kekerabatan ke dalam sistem politik desa, sehingga mereka dapat mengendalikan partisipasi masyarakat dan memperkuat posisi mereka. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka menempatkan anggota keluarga dalam posisi strategis, seperti perangkat desa dan kepala dusun, sehingga memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat. Selain itu, dinasti Atma Wijaya juga menunjukkan tingkat adaptasi yang tinggi dalam menghadapi dinamika politik lokal. Kemampuan mereka untuk merekrut kader dari pihak lawan sebagai strategi politik mencerminkan bagaimana hubungan kekerabatan dapat digunakan secara fleksibel untuk meredam ancaman dan memperluas pengaruh. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Kurtz bahwa politik kekerabatan tidak bersifat statis, melainkan dapat dimodifikasi sesuai dengan kepentingan kelompok dominan. Dengan demikian, kasus Atma Wijaya menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam politik kekerabatan bukan hanya sekadar mekanisme sosial, tetapi juga strategi yang efektif dalam mempertahankan kekuasaan di tengah kompetisi politik.

BAB V
DAMPAK DOMINASI DINASTI POLITIK ATMA WIJAYA TERHADAP
PROSES DEMOKRASI DI DESA SINDANGWANGI KABUPATEN
BREBES

Demokrasi di tingkat desa berlandaskan pada prinsip musyawarah yang menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan desa. Dalam praktiknya, musyawarah ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa, dalam membahas berbagai aspirasi serta merancang agenda pembangunan lokal. Proses demokrasi desa mencakup tahapan pemilihan anggota BPD dan Kepala Desa, serta pelaksanaan Musyawarah Desa yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan serta kepentingan masyarakat (Romli, 2019). Pentingnya keseimbangan hubungan antara BPD dan Kepala Desa juga menjadi perhatian utama, di mana kedua lembaga ini diharapkan dapat saling mengawasi guna menciptakan mekanisme *check and balances* yang efektif. Selain itu, transparansi dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa. Dari perspektif kearifan lokal, demokrasi desa perlu menyesuaikan dengan karakter budaya dan sosial di setiap wilayah agar dapat mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Namun, dalam praktik demokrasi desa sering kali menghadapi tantangan serius yang menghambat prinsip musyawarah dan partisipasi yang ideal. Salah satu contoh nyata adalah dominasi dinasti politik Atma Wijaya di Desa Sindangwangi yang berdampak signifikan terhadap nilai dan prinsip demokrasi. Keluarga Atma Wijaya dengan jaringan luas serta banyak anggota yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan desa menciptakan tekanan bagi pemilih untuk memilih kandidat dari keluarga ini, meskipun ada calon lain yang lebih kompeten. Selain itu, intimidasi terhadap warga yang tidak mendukung dinasti ini kerap dilaporkan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat dan memilih, yang seharusnya menjadi inti dari demokrasi desa.

Praktik politik uang atau *money politics* juga menjadi tantangan serius dalam demokrasi desa, dimana dukungan masyarakat sering kali dibeli dengan imbalan finansial. Hal ini merusak integritas proses pemilihan dan menciptakan ketidakadilan bagi calon lain yang tidak memiliki sumber daya yang sama. Lebih lanjut, dominasi dinasti ini menurunkan partisipasi warga dalam proses politik karena masyarakat merasa hasil pemilihan sudah ditentukan oleh kekuatan dinasti, yang pada akhirnya mengurangi kualitas demokrasi di tingkat desa.

Selain merusak demokrasi, dominasi dinasti Atma Wijaya juga berdampak mendalam pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan jaringan luas di berbagai tingkatan pemerintahan desa, keluarga ini memanfaatkan posisi mereka untuk mengontrol sumber daya dan peluang ekonomi, menciptakan ketidaksetaraan yang menghambat masyarakat lain dalam mengakses program pembangunan. Akibatnya, struktur sosial di desa menjadi lebih hierarkis, di mana loyalitas kepada keluarga dinasti lebih diutamakan dibandingkan meritokrasi. Kondisi ini memperburuk ketegangan sosial, menghambat solidaritas komunitas, dan memperkuat ketidakadilan.

Untuk memahami fenomena ini, teori *Historical Institutionalism* karya Sven Steinmo memberikan kerangka analisis yang kuat dengan menyoroti pengaruh institusi dan sejarah dalam membentuk perilaku politik. Di sisi lain, teori *Political Kinship* dari Donald V. Kurtz menyoroti peran hubungan kekerabatan dalam politik lokal yang relevan untuk menjelaskan bagaimana dinasti Atma Wijaya mempertahankan kekuasaan mereka. Kombinasi kedua teori ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika dominasi politik di Desa Sindangwangi, mencakup interaksi antara institusi, sejarah, dan hubungan sosial yang terus berlangsung.

Dengan demikian, meskipun demokrasi desa secara ideal bertumpu pada prinsip musyawarah, transparansi, dan keseimbangan kekuasaan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa faktor politik, ekonomi, dan sosial sering kali menghambat penerapan demokrasi yang sehat. Kasus dominasi dinasti politik Atma Wijaya menjadi gambaran konkret bagaimana praktik politik yang tidak sehat dapat melemahkan demokrasi desa dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Oleh

karena itu, upaya penguatan demokrasi desa harus mencakup reformasi kelembagaan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar prinsip demokrasi yang sejati dapat terwujud di tingkat lokal.

A. Karakteristik Dominasi Dinasti Atma Wijaya

1. Strategi Sosial dan Politik

Pemanfaatan jaringan keluarga dalam mengontrol kekuasaan di Desa Sindangwangi terlihat jelas melalui peran tokoh desa dan aturan pemilihan kepala desa yang ada. Keluarga Atma Wijaya, sebagai dinasti yang dominan, telah menempatkan anggotanya di berbagai posisi strategis dalam pemerintahan desa, termasuk sebagai kepala dusun dan perangkat desa lainnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempengaruhi keputusan politik dan kebijakan yang diambil, serta mengarahkan dukungan masyarakat untuk memilih calon yang berasal dari keluarga mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Suklim: "Keluarga Atma Wijaya dan keluarga pengikutnya menjadi strategi politik untuk menjaga dukungan dari masyarakat." (Wawancara Suklim, 27 November 2024). Dengan demikian, jaringan kekerabatan ini tidak hanya berfungsi untuk memperkuat posisi politik mereka, tetapi juga menciptakan sistem di mana masyarakat merasa terikat untuk mendukung calon dari dinasti tersebut, meskipun ada calon lain yang mungkin lebih kompeten.

Pemusatan kekuasaan yang terjadi dalam dinasti ini menciptakan ketergantungan masyarakat pada keluarga Atma Wijaya yang berimplikasi pada dinamika sosial dan politik di desa. Ketika kekuasaan terpusat pada satu keluarga, masyarakat menjadi tergantung pada keputusan dan kebijakan yang diambil oleh dinasti tersebut, baik dalam hal akses terhadap sumber daya maupun dalam hal perlindungan sosial. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Suklim: "Jika tidak ada dukungan dari keluarga Atma Wijaya, sudah pasti calon kepala desa tersebut akan kalah." (Wawancara Suklim, 27 November 2024). Ketergantungan ini menciptakan situasi di mana masyarakat merasa

terpaksa untuk mendukung dinasti, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan kebijakan yang diambil. Akibatnya, hal ini menghambat partisipasi politik yang lebih luas dan menciptakan iklim di mana suara masyarakat tidak sepenuhnya terwakili, sehingga memperkuat dominasi dinasti dan mengurangi peluang bagi calon pemimpin lain untuk bersaing secara adil.

Pola pemanfaatan jaringan keluarga dalam mengontrol kekuasaan di Desa Sindangwangi merupakan hasil dari institusi politik yang berkembang secara historis dan mencerminkan keberlanjutan struktur kekuasaan yang telah terbangun dalam jangka panjang. Steinmo menekankan bahwa institusi tidak hanya membentuk perilaku politik, tetapi juga menciptakan insentif dan batasan bagi aktor politik, yang dalam konteks ini terlihat dari bagaimana dinasti Atma Wijaya mempertahankan dominasinya melalui mekanisme politik yang terinstitusionalisasi.

Pola ini bukan hanya sekadar hasil dari strategi individu atau keluarga, tetapi juga akibat dari sistem politik desa yang memungkinkan konsolidasi kekuasaan dalam satu kelompok tertentu. Pemusatan kekuasaan pada keluarga Atma Wijaya menciptakan *path dependency*, dimana masyarakat terbiasa dengan struktur politik yang ada, sehingga sulit bagi calon alternatif untuk mendapatkan dukungan yang cukup. Pernyataan Suklim yang menekankan bahwa: “Tanpa dukungan keluarga Atma Wijaya, calon kepala desa akan sulit menang.” (Wawancara Suklim, 27 November 2024). Menunjukkan bahwa aturan permainan politik di desa tersebut telah menguntungkan kelompok yang sudah berkuasa, sebuah karakteristik khas dalam teori *historical institutionalism*.

Selain itu, pola ketergantungan masyarakat terhadap keluarga Atma Wijaya dalam hal akses sumber daya dan perlindungan sosial mencerminkan bagaimana institusi informal turut membentuk dinamika politik desa. Ini sejalan dengan pandangan Steinmo bahwa institusi bukan hanya aturan formal, tetapi juga norma dan praktik yang mengakar dalam masyarakat. Akibatnya, meskipun ada kemungkinan perubahan, sistem ini tetap bertahan karena

masyarakat telah terikat dalam pola politik yang diwariskan secara historis. Dengan demikian, dominasi dinasti Atma Wijaya bukan sekadar hasil dari preferensi politik sesaat, tetapi dari sebuah institusi yang telah berkembang dan mengakar dalam struktur politik desa.

2. Peran Institusi dalam Politik Desa Sindangwangi

Institusi desa di Sindangwangi memainkan peran krusial dalam menciptakan mekanisme formal yang memperkuat keberlanjutan kekuasaan dinasti Atma Wijaya. Struktur pemerintahan desa, termasuk posisi-posisi strategis dan aturan pemilihan, sering kali dikuasai oleh anggota keluarga dinasti ini. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan dan memengaruhi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Salah satu faktor pendukung dominasi ini adalah jaringan kekuasaan yang terjalin melalui hubungan kekerabatan. Seperti yang diungkapkan oleh Ramidi: "Jaringan kekuasaannya dibangun dari keluarganya yang ada di setiap dusun di desa Sindangwangi." (Wawancara Ramidi, 27 November 2024). Keberadaan anggota keluarga di berbagai posisi pemerintahan menciptakan sistem yang saling mendukung, memperkuat posisi dinasti, dan mengurangi kemungkinan munculnya oposisi yang efektif.

Selain itu, strategi dinasti Atma Wijaya untuk mempertahankan dukungan masyarakat sangat efektif dan terencana. Ramidi selaku mantan sekretaris desa mengatakan: "Keluarga Atma Wijaya yaitu melakukan pendekatan ke panitia pemilihan sampai ke perangkat desa." (Wawancara Ramidi, 27 November 2024). Hal tersebut adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa dukungan terhadap dinasti tetap terjaga. Dengan mengisi posisi-posisi penting dengan individu yang loyal, dinasti ini tidak hanya memengaruhi hasil pemilihan tetapi juga mengontrol jalannya pemerintahan desa. Lebih jauh, institusi desa turut menciptakan norma sosial yang memberikan legitimasi tambahan bagi kekuasaan mereka. Seperti yang dinyatakan oleh Sudono: "Mbah Atma Wijaya menjadi tokoh masyarakat dan

paranormal sehingga disegani serta dihormati di desa Sindangwangi." (Wawancara Sudono, 30 November 2024).

Dominasi dinasti Atma Wijaya di Desa Sindangwangi bukan sekadar hasil strategi individu, tetapi merupakan konsekuensi dari institusi politik yang telah berkembang dan mengakar secara historis. Institusi desa tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga membentuk aturan main politik yang menguntungkan kelompok yang telah lama berkuasa. Seperti yang ditekankan oleh Steinmo, institusi menciptakan insentif dan batasan yang menentukan perilaku politik aktor-aktornya. Dalam konteks ini, struktur pemerintahan desa yang dikendalikan oleh keluarga Atma Wijaya menunjukkan adanya *path dependence*, di mana pola kekuasaan yang sudah terbentuk terus direproduksi karena memberikan keuntungan bagi kelompok dominan dan sulit diubah oleh aktor baru. Jaringan kekuasaan berbasis kekerabatan yang tersebar di berbagai posisi strategis tidak hanya memperkuat legitimasi dinasti, tetapi juga menghambat munculnya oposisi yang efektif. Selain itu, norma sosial yang menempatkan figur Atma Wijaya sebagai tokoh masyarakat yang dihormati semakin memperkuat stabilitas institusional dinasti ini, menciptakan legitimasi kultural yang mendukung keberlanjutan kekuasaan mereka. Dengan demikian, dominasi dinasti Atma Wijaya bukan sekadar fenomena politik sementara, melainkan bagian dari struktur institusional yang telah terbangun dan terus bertahan dalam sistem politik desa.

3. Peran *Kinship* dalam Struktur Politik Desa Sindangwangi

Hubungan kekerabatan menjadi pilar utama dalam membangun dan mempertahankan struktur kekuasaan dinasti Atma Wijaya di Desa Sindangwangi. Ikatan keluarga tidak hanya berfungsi sebagai fondasi sosial, tetapi juga menjadi alat strategis untuk menguasai aspek politik dan ekonomi desa. Dengan memanfaatkan hubungan kekerabatan, dinasti ini mampu menciptakan jaringan dukungan yang solid dan luas, yang memastikan keberlanjutan kekuasaan mereka secara efektif.

Salah satu cara dinasti Atma Wijaya memperkuat struktur kekuasaan adalah dengan menempatkan anggota keluarga di posisi-posisi strategis dalam pemerintahan desa. Ini menunjukkan bahwa keberadaan anggota keluarga di berbagai posisi kunci memungkinkan mereka untuk mengontrol proses pengambilan keputusan dan memengaruhi kebijakan lokal yang dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan bagi dinasti dalam mempertahankan dominasinya. Seperti diungkapkan oleh Sutanto:

"Kerabatnya yang ada di desa Sindangwangi rata rata menjadi perangkat desa, saya juga masih keluarga dari Atma Wijaya, contoh lainnya Bu Eka dan kadus Jetak. Untuk yang lainnya saya tidak tahu, mungkin jika ditelusuri lebih jauh bisa jadi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Atma Wijaya." (Wawancara Sutanto, 1 Desember 2024).

Selain itu, hubungan kekerabatan juga menciptakan rasa loyalitas kuat di antara masyarakat yang bisa memanfaatkan kekuasaan formal, dinasti ini juga membangun hubungan emosional dengan masyarakat melalui materi, sehingga masyarakat merasa terbantu secara ekonomi dan memilih untuk mendukung mereka. Loyalitas ini memperkuat posisi dinasti, terutama dalam konteks pemilihan kepala desa dan kebijakan publik. Mantan kepala Desa Sindangwangi menyebutkan bahwa:

"Yang penting mempunyai uang mas, pasti banyak orang orang yang mau jadi bawahan, selain itu Atma Wijaya punya banyak keluarganya yang ada di desa Sindangwangi jadi lebih gampanglah pokoknya" (Wawancara Daryo, 30 November 2024).

Lebih jauh lagi, hubungan kekerabatan digunakan untuk menghadapi tantangan dari calon pemimpin lain. Dinasti Atma Wijaya tidak hanya melindungi kepentingannya sendiri, tetapi juga secara proaktif melemahkan potensi pesaing dengan mengintegrasikan mereka ke dalam jaringan kekerabatan. Kustoro mengungkapkan bahwa: "Sudono itu selalu mencari kader-kader dari calon lawannya untuk menjadi penyusup, sehingga mempermudah untuk mendapatkan informasi." (Wawancara Kustoro, 1 Desember 2024).

Kekuasaan dinasti Atma Wijaya di Desa Sindangwangi merupakan bentuk dominasi politik yang bertumpu pada hubungan kekerabatan sebagai

mekanisme utama kontrol sosial dan politik. Dalam sistem politik berbasis kekerabatan, kekuasaan tidak hanya diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga diperkuat melalui jaringan hubungan keluarga yang menguasai institusi-institusi formal dan informal. Dalam konteks ini, dinasti Atma Wijaya menggunakan strategi penempatan anggota keluarga di posisi pemerintahan desa untuk memastikan kendali atas kebijakan dan distribusi sumber daya yang sejalan dengan konsep Donald V. Kurtz tentang bagaimana kelompok kekerabatan mempertahankan hegemoni mereka melalui struktur politik yang eksklusif. Selain itu, penggunaan loyalitas berbasis kekerabatan serta pemberian manfaat ekonomi kepada masyarakat menciptakan keterikatan emosional yang memperkuat stabilitas kekuasaan dinasti, sebuah fenomena yang juga disebut Kurtz sebagai patronase kekerabatan. Strategi lain yang digunakan, seperti menyusupkan anggota ke dalam jaringan lawan politik, menunjukkan bagaimana dinasti Atma Wijaya tidak hanya bertahan, tetapi juga secara aktif mengeliminasi ancaman terhadap dominasi mereka. Dengan demikian, dinasti Atma Wijaya tidak hanya beroperasi sebagai entitas politik tradisional, tetapi juga sebagai sistem politik kekerabatan yang kompleks, di mana hubungan darah dan jaringan sosial berfungsi sebagai alat utama dalam mempertahankan dan memperluas pengaruh kekuasaan.

B. Dampak Dominasi Keluarga Atma Wijaya Terhadap Proses Demokrasi Desa

1. Sentralisasi Kekuasaan dan Demokrasi Formal/Prosedural

Dominasi politik yang kuat di Desa Sindangwangi, khususnya oleh dinasti Atma Wijaya, telah menciptakan situasi di mana partisipasi masyarakat menjadi terbatas dan mekanisme check and balance di tingkat desa melemah. Ketika hampir seluruh aspek pemerintahan desa dikuasai oleh satu keluarga atau dinasti, suara dan aspirasi masyarakat sering kali tidak diprioritaskan. Kondisi ini mengarah pada terciptanya sistem politik yang tidak inklusif, di mana keputusan-keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan dinasti daripada kebutuhan kolektif masyarakat. Salah satu dampak signifikan dari dominasi ini adalah terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk

berpartisipasi dalam proses politik. Seperti yang diungkapkan oleh Darto: "Keluarga Atma Wijaya dan keluarga pengikutnya yang dikumpulkan menjadi satu, kurang lebih ada 50% jika disatukan. Ini yang jadi strategi politik untuk menjaga dukungan keluarga Atma Wijaya dari masyarakat." (Wawancara Darto, 1 Desember 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat sering kali dibangun melalui hubungan patronase, di mana warga merasa terikat untuk mendukung dinasti ini karena hubungan kekerabatan atau imbalan tertentu, bukan berdasarkan kebijakan atau program yang substansial. Dominasi politik ini juga berdampak pada melemahnya mekanisme check and balance dalam pemerintahan desa. Ketika seluruh perangkat desa dan tokoh masyarakat berasal dari satu keluarga atau dinasti, pengawasan terhadap kekuasaan menjadi sangat lemah. Darto menjelaskan lebih lanjut bahwa: "Perangkat desa dan kadus nya saja berasal dari keluarganya, jadi ya bisa dikondisikan masyarakatnya untuk memilih keluarga dari Atma Wijaya." (Wawancara Darto, 1 Desember 2024). Ini yang mengindikasikan bahwa tidak ada pihak yang berfungsi sebagai penyeimbang atau pengawas yang independen.

Lebih lanjut, dominasi politik ini juga merusak substansi demokrasi di desa, menjadikannya prosedural semata tanpa ruang bagi pilihan bebas masyarakat. Pemilihan kepala desa, misalnya, tidak lagi mencerminkan keputusan yang diambil berdasarkan kebebasan memilih, melainkan lebih kepada pengesahan kekuasaan yang telah ada, seperti yang diungkapkan oleh Suklim: "Masyarakat desa sindangwangi dipaksa mendukung keluarganya oleh keluarga Atma Wijaya." (Wawancara Suklim, 27 November 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pilihan masyarakat sering kali diwarnai oleh tekanan dan pengaruh dari dinasti yang berkuasa. Dalam konteks ini, pola patronase yang diterapkan oleh dinasti Atma Wijaya mengabaikan prinsip keterwakilan, mengakibatkan masyarakat kehilangan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka. Ketidakpuasan warga semakin mendalam, namun mereka merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengubah situasi tersebut. Dominasi politik ini tidak hanya membatasi partisipasi masyarakat,

tetapi juga merusak fondasi demokrasi, yang seharusnya memberi ruang bagi semua suara untuk didengar dan diperhitungkan.

Dominasi politik dinasti Atma Wijaya di Desa Sindangwangi merupakan hasil dari institusi politik yang telah berkembang dan mengakar secara historis, menciptakan struktur kekuasaan yang sulit diubah. Institusi tidak hanya membentuk perilaku politik, tetapi juga menciptakan insentif dan batasan yang mempengaruhi jalannya pemerintahan dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, dominasi satu keluarga dalam pemerintahan desa menunjukkan adanya *path dependency*, di mana aturan informal dan mekanisme politik yang telah mapan terus direproduksi, bahkan ketika sistem tersebut membatasi partisipasi masyarakat dan melemahkan prinsip demokrasi. Dengan kontrol penuh atas struktur pemerintahan desa dan mekanisme *check and balance* yang lemah, dinasti Atma Wijaya dapat mempertahankan kekuasaannya tanpa tantangan berarti, menciptakan sistem politik yang eksklusif dan tidak inklusif. Dukungan masyarakat yang diperoleh melalui hubungan patronase dan tekanan sosial mencerminkan bagaimana institusi yang ada tidak mendorong persaingan politik yang sehat, melainkan mengkonsolidasikan dominasi satu kelompok. Selain itu, kondisi di mana pemilihan kepala desa hanya menjadi formalitas untuk mengesahkan kekuasaan yang telah ada menunjukkan bahwa sistem politik desa tidak berkembang menuju demokrasi substantif, melainkan tetap berada dalam pola yang diwariskan secara historis. Dengan demikian, dominasi dinasti Atma Wijaya bukan hanya akibat dari strategi politik mereka saat ini, tetapi juga dari struktur institusional yang telah lama terbentuk dan secara sistematis menghambat perubahan serta partisipasi politik yang lebih luas.

2. Interaksi Antara Kepentingan dan Institusi

Hubungan antara kepentingan dinasti dan struktur desa di Desa Sindangwangi menciptakan insentif yang kuat untuk mempertahankan status quo, di mana kekuasaan dan pengaruh tetap berada di tangan dinasti tertentu, yakni dinasti Atma Wijaya. Dinasti ini telah membangun jaringan kekuasaan

yang solid dan terintegrasi dengan struktur sosial dan politik desa, yang menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi mereka untuk terus berkuasa. Keterikatan keluarga yang luas di seluruh desa dengan banyak anggota keluarga yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan desa semakin memperkuat dominasi mereka, seperti yang diungkapkan oleh Katijo:

"Jaringan kekuasaannya dibangun dari keluarganya yang ada di setiap dusun di desa Sindangwangi, banyak sekali perangkat desa yang dari keluarganya. Saya dan Daryo juga masih bagian dari keluarganya, Atma Wijaya itu paman saya." (Wawancara Katijo, 30 November 2024).

Selain itu, dinasti Atma Wijaya juga memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi yang memungkinkan mereka memberikan insentif kepada masyarakat untuk mendukung mereka. Praktik *money politics* menjadi salah satu cara mereka untuk mempertahankan kekuasaan, di mana dukungan masyarakat sering kali dibeli dengan imbalan finansial. Daryo menyatakan bahwa: "Uang sangat mempengaruhi lah, kemarin pas pilkades 2019 kan yang bagi bagi uangnya si Dedi adiknya si Ile, uangnya dari Sudono." (Wawancara Daryo, 30 Desember 2024). Sudono juga menegaskan bahwa uang itu sangat penting dalam menjalankan pemilihan di tingkat desa. Sebagaimana diperkuat oleh pernyataan Sudono:

"Sekarang mana ada orang liat figur tapi liatnya uang, kan kamu tahu sendiri masyarakat Desa Sindangwangi itu gimana, saya Sudono yang dari dulu mengayomi masyarakat Sindangwangi, tanya saja ke orang orang Sindangwangi pasti tahu Sudono. Nyatanya kemarin saya kalah telak lawan si Rizki, Ridwan juga di Ciheuleutnya juga kalah kan sama si Rizki. Ya itu, uang sangat penting daripada figur di zaman sekarang ini." (Wawancara Sudono, 30 Desember 2024).

Dinasti ini menciptakan ketergantungan ekonomi di kalangan masyarakat, ketergantungan ini membuat warga enggan untuk menantang status quo, karena mereka takut kehilangan akses terhadap sumber daya yang mereka butuhkan. Dinasti ini juga mengontrol proses pemilihan kepala desa dan perangkat desa lainnya, sehingga calon-calon yang berpotensi menantang kekuasaan mereka sering kali dihalangi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Suklim: "Jika tidak ada dukungan dari keluarga Atma Wijaya, sudah pasti

calon tersebut akan kalah." (Wawancara Suklim, 27 November 2024). Dengan mengendalikan proses ini, dinasti menciptakan insentif bagi masyarakat untuk tetap memilih mereka, karena mereka merasa tidak ada alternatif yang layak.

Pola patronase yang dibangun oleh dinasti Atma Wijaya semakin memperkuat ketergantungan masyarakat, yang merasa terikat untuk memberikan dukungan kembali setelah menerima bantuan atau dukungan dari dinasti. Suklim menyatakan bahwa: "Keluarga Atma Wijaya dan keluarga pengikutnya menjadi strategi politik untuk menjaga dukungan dari masyarakat Desa Sindangwangi." (Wawancara Suklim, 27 November 2024). Hal ini dapat menciptakan resistensi terhadap perubahan, karena setiap upaya untuk menggulingkan kekuasaan dinasti ini sering kali dihadapi dengan intimidasi atau penghalangan terhadap calon pemimpin lain. Seperti yang diungkapkan oleh Kustoro: "Sudono itu selalu mencari kader-kader dari calon lawan untuk menjadi penyusup, sehingga bisa memudahkannya untuk mencari informasi dari lawan." (Wawancara Kustoro, 1 Desember 2024). Pernyataan diatas menunjukkan bahwa dinasti ini tidak hanya mempertahankan kekuasaan mereka tetapi juga berusaha mengontrol dinamika politik di desa. Dengan demikian, hubungan antara kepentingan dinasti Atma Wijaya dan struktur desa menciptakan insentif yang kuat untuk mempertahankan status quo, yang menghambat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan menghalangi munculnya alternatif kepemimpinan yang dapat membawa perubahan.

3. Fleksibilitas dalam Struktur Sosial

Dinasti Atma Wijaya menunjukkan kemampuan adaptasi yang signifikan terhadap tantangan politik lokal melalui pembentukan aliansi strategis dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Mereka tidak hanya bergantung pada warisan kekuasaan yang telah ada, tetapi juga secara aktif membangun hubungan dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan perangkat desa. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam akan pentingnya menjaga komunikasi yang baik dan menjalankan amanah. Hal tersebut ditegaskan oleh Daryo yang mengatakan bahwa: "Saling keterbukaan kepada

masyarakat dan menjalankan amanah dengan baik sebagai kunci membangun kepercayaan masyarakat” (Wawancara Daryo, 30 November 2024). Melalui komunikasi yang intensif dan silaturahmi yang konsisten, dinasti ini mampu mempertahankan dukungan masyarakat, yang menjadi elemen vital dalam melanggengkan kekuasaan mereka.

Selain membangun relasi sosial, kontrol atas sumber daya menjadi strategi penting yang diterapkan oleh dinasti ini. Daryo mengungkapkan bahwa: "Keluarga Atma Wijaya mempunyai keluarga yang tersebar di seluruh dusun yang ada di desa Sindangwangi.” (Wawancara Daryo, 30 November 2024). Hal ini menunjukkan peran strategis jaringan keluarga dalam memengaruhi keputusan politik dan alokasi sumber daya. Kemudian Rujo yang merupakan adik dari Sudono juga menegaskan bahwa: "Power dinasti Atma Wijaya sangat besar yang tidak mungkin untuk digulingkan.” (Wawancara Rujo, 1 Desember 2024). Pernyataan tersebut mencerminkan pengaruh kuat mereka dalam politik lokal, termasuk dalam pengelolaan anggaran desa. Dengan memanfaatkan hubungan keluarga dan jaringan yang luas, dinasti Atma Wijaya berhasil memperkuat kontrol mereka atas pemerintahan desa.

Dominasi dinasti Atma Wijaya di Desa Sindangwangi merupakan manifestasi dari sistem politik berbasis kekerabatan, di mana hubungan keluarga menjadi mekanisme utama dalam mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dalam sistem politik kekerabatan, aktor politik tidak hanya mengandalkan warisan kekuasaan, tetapi juga secara aktif membangun dan memanfaatkan jaringan sosial untuk memperkuat dominasi mereka. Hal ini terlihat dari bagaimana dinasti Atma Wijaya membentuk aliansi strategis dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa, mencerminkan konsep tentang pentingnya hubungan sosial dalam politik kekerabatan. Selain itu, pengelolaan sumber daya menjadi instrumen kontrol yang signifikan, di mana distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya ekonomi digunakan sebagai alat untuk mempertahankan loyalitas masyarakat dan mempersempit ruang bagi oposisi. Dinasti ini tidak hanya mengandalkan kekuasaan turun-temurun, tetapi juga secara aktif mengadaptasi strategi penguasa untuk mempertahankan posisi

dominan. Dengan menempatkan anggota keluarga di berbagai dusun dan memastikan kendali atas anggaran desa, dinasti ini menciptakan struktur politik yang sulit digulingkan, oleh karena itu, dinasti Atma Wijaya tidak hanya menunjukkan bentuk klasik politik kekerabatan, tetapi juga menggambarkan bagaimana sistem ini dapat berkembang dan menyesuaikan diri terhadap tantangan politik lokal untuk memastikan keberlanjutan kekuasaan mereka.

4. Demokrasi Semu di Desa Sindangwangi

Demokrasi desa di Desa Sindangwangi sering kali hanya menjadi formalitas yang tidak mencerminkan kebebasan atau keterwakilan masyarakat. Meskipun ada struktur pemerintahan yang tampak demokratis, seperti pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kenyataannya, banyak keputusan yang diambil tanpa melibatkan partisipasi aktif dari warga. Hal ini menciptakan kesan bahwa proses demokrasi hanya berjalan di permukaan, tanpa memberikan ruang bagi suara masyarakat yang sebenarnya.

Salah satu faktor yang memperkuat kondisi ini adalah penunjukan anggota BPD yang dilakukan oleh pihak desa, khususnya orang-orang kepercayaan Sudono, yang merupakan cucu dari Atma Wijaya. Dalam konteks ini, BPD tidak berfungsi sebagai perwakilan rakyat, melainkan lebih sebagai alat untuk mendukung kebijakan kepala desa. Seperti yang diungkapkan oleh Suklim:

"Enak banget kan saudara-saudaranya jadi orang penting di desa. Kan yang jadi ketua BPD nya Mang Kusnan yang merupakan orang kepercayaan dari Sudono. Semua anggota BPD kan ditunjuk, kecuali yang dari Ciheuleut, itu direkomendasikan oleh warga." (Wawancara Suklim, 27 November 2024).

Ketergantungan ekonomi dan sosial masyarakat terhadap dinasti ini semakin memperkuat pola kontrol yang ada, mengurangi otonomi warga. Banyak warga merasa terpaksa untuk mendukung calon dari dinasti tersebut karena adanya tekanan sosial dan ekonomi, hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada proses pemilihan, kekuasaan yang dimiliki oleh dinasti ini telah menghilangkan makna sejati dari demokrasi, di mana seharusnya setiap suara

memiliki arti dan setiap warga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Daryo sebagai mantan kepala desa menjelaskan bahwa:

"Kepemimpinan Atma Wijaya dari zaman Belanda keluarganya menjadi sosok yang di segani di desa. Karena keluarganya yang kaya raya, sehingga pada pemilihan kepala desa yang pertama sering membagi-bagi gabah ke masyarakat. Oleh karena itu, pengaruhnya masih terasa hingga kini." (Wawancara Daryo, 30 November 2024).

Dalam musyawarah desa, BPD yang seharusnya menjadi perwakilan masyarakat justru berfungsi untuk mengesahkan keputusan yang telah ditentukan oleh kepala desa. Hal ini menciptakan situasi di mana warga merasa tidak memiliki kontrol atas kehidupan politik dan sosial mereka. Dengan demikian, ketergantungan ekonomi dan sosial yang ada tidak hanya memperkuat kontrol dinasti, tetapi juga menciptakan siklus di mana warga kehilangan otonomi dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.

Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan bahwa untuk mencapai demokrasi yang sejati, perlu ada upaya untuk merombak struktur kekuasaan yang ada dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas. Tanpa adanya perubahan dalam cara BPD berfungsi dan bagaimana keputusan diambil, demokrasi desa akan terus menjadi sekadar simbol tanpa substansi, di mana suara masyarakat yang lebih luas diabaikan.

5. Resistensi Perubahan Dinasti Politik di Desa Sindangwangi

Kekuasaan dinasti di Desa Sindangwangi menggambarkan bagaimana pola historis yang terbentuk menciptakan siklus kekuasaan yang sulit diubah tanpa intervensi struktural. Dinasti Atma Wijaya yang telah memimpin desa ini sejak 1933 membangun jaringan kekuasaan yang terintegrasi melalui distribusi posisi strategis kepada anggota keluarga di berbagai lapisan pemerintahan desa. Hal ini terlihat dalam wawancara Katijo yang menyebutkan bahwa:

"Jaringan kekuasaannya dibangun dari keluarganya yang ada di setiap dusun di desa Sindangwangi, banyak sekali perangkat desa

yang dari keluarganya. Saya dan Daryo juga masih bagian dari keluarganya, Atma Wijaya itu paman saya" (Wawancara Katijo, 30 November 2024).

Jaringan ini memungkinkan kekuasaan tersebar secara kolektif di antara anggota keluarga, menciptakan sistem yang saling menguntungkan dan memperkuat dominasi mereka. Hubungan kekerabatan yang erat juga memainkan peran penting dalam penguatan pengaruh politik, sebagaimana diungkapkan oleh Darto: "Perangkat desa dan kadus nya saja berasal dari keluarganya, jadi ya bisa dikondisikan masyarakatnya untuk memilih keluarga dari Atma Wijaya." (Wawancara Darto, 1 Desember 2024).

Dinasti Atma Wijaya juga memperlihatkan resistensi terhadap perubahan yang membuat calon pemimpin lain sulit bersaing secara adil. Hambatan yang signifikan ini sering kali melibatkan campur tangan aktor politik eksternal. Karena faktor ini, banyak sekali masyarakat yang sudah menyerah terlebih dahulu disebabkan oleh Sudono yang menjadi patron dalam setiap pemilihan kepala desa di Desa Sindangwangi. sebagaimana diungkapkan oleh Daryo:

"Pasti calon lain ada hambatan, karena adanya campur tangan dari Sudono yang merupakan cucu dari Atma Wijaya yang pernah menjabat sebagai mantan kepala desa dan sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Brebes" (Wawancara Daryo, 30 November 2024).

Dominasi dinasti Atma Wijaya di Desa Sindangwangi merupakan contoh konkret bagaimana hubungan kekerabatan digunakan sebagai alat utama dalam mempertahankan kekuasaan politik. Dalam sistem politik kekerabatan, aktor politik tidak hanya mengandalkan struktur formal pemerintahan, tetapi juga membangun jaringan sosial berbasis keluarga untuk mengontrol distribusi kekuasaan dan sumber daya. Hal ini terlihat dalam cara dinasti Atma Wijaya menempatkan anggota keluarganya di berbagai posisi strategis di pemerintahan desa. Dengan menguasai struktur pemerintahan secara kolektif, mereka menciptakan sistem patronase yang memastikan loyalitas masyarakat, sekaligus menghambat munculnya oposisi yang efektif. Lebih lanjut, resistensi terhadap perubahan yang ditunjukkan oleh dinasti ini juga mencerminkan pola khas dalam politik kekerabatan, dimana persaingan politik lebih bersifat eksklusif dan cenderung dimonopoli oleh dinasti Atma Wijaya. Keterlibatan

Sudono sebagai aktor politik eksternal yang memperkuat pengaruh dinasti menegaskan bahwa kekerabatan tidak hanya berfungsi dalam lingkup lokal, tetapi juga dapat diperluas ke tingkat yang lebih tinggi, seperti legislatif daerah. Dengan demikian, model politik kekerabatan yang diterapkan oleh dinasti Atma Wijaya tidak hanya mencerminkan ketergantungan pada hubungan keluarga dalam mempertahankan kekuasaan, tetapi juga menunjukkan bagaimana jaringan kekerabatan dapat menciptakan struktur politik yang sulit ditembus, menghambat demokratisasi, dan memperkuat oligarki lokal. Tanpa reformasi struktural yang membatasi dominasi politik berbasis keluarga, siklus kekuasaan ini akan terus berlanjut, membatasi akses masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih inklusif dan kompetitif.

C. Manipulasi Kebijakan untuk Mempertahankan Kekuasaan

1. Pemanfaatan Institusi dan Regulasi Desa

Manipulasi regulasi dalam alokasi dana desa menjadi salah satu strategi utama dinasti politik untuk memperkuat dukungan mereka. Di Desa Sindangwangi, kebijakan yang semestinya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas sering kali diarahkan untuk keuntungan keluarga tertentu. Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat justru kerap disalahgunakan untuk proyek-proyek yang menguntungkan anggota keluarga yang berkuasa. Akibatnya, masyarakat menjadi bergantung pada bantuan atau proyek yang diberikan oleh dinasti tersebut, meskipun hal itu tidak selalu mencerminkan kebutuhan kolektif desa. Hal ini diungkapkan oleh Rujo:

“Memang sering adanya proyek yang tidak sesuai dengan anggarannya, yang harusnya anggaran untuk jalan 500 meter tetapi yang jadi hanya 300 meter. Kemana itu uangnya? Jadi pas saya jadi kepala desa nanti, saya ingin mengubah kebijakan kebijakan yang ada. Bahkan anggaran dana desa pun tidak transparan kan? Nah itu susahnya desa kita ya seperti itu.” (Wawancara Rujo, 1 Desember 2024).

Selain itu, manipulasi struktur perangkat desa turut memperkuat dominasi dinasti ini dengan mengurangi keterbukaan dalam proses

perencanaan pembangunan desa, seperti musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembangdes). Dalam proses pengambilan keputusan penting sering kali hanya melibatkan anggota keluarga dinasti dan orang-orang yang loyal kepada mereka, tanpa partisipasi masyarakat. Dengan struktur perangkat desa yang didominasi oleh orang-orang yang loyal kepada dinasti Atma Wijaya, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi menjadi sangat terbatas. Kustoro mengungkapkan: "Pengaruh Atma Wijaya yang menjadi dukun dan lurah, dekat dengan bupati pada saat itu, membuat semua keputusan diambil tanpa melibatkan masyarakat." (Wawancara Kustoro, 1 Desember 2024).

Akan tetapi, pada akhirnya selama dinasti ini berkuasa, masyarakat jarang memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan, dan musrembangdes hanya menjadi formalitas tanpa substansi. Oleh karena itu, manipulasi regulasi dan penguasaan struktur perangkat desa tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, tetapi juga memperkuat hegemoni dinasti politik. Kondisi ini menghalangi terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif, yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi lokal.

2. *Institutional Lock-In* di Desa Sindangwangi

Berdasarkan konteks Desa Sindangwangi mengenai institusi yang ada, baik dalam struktur pemerintahan desa maupun praktik politiknya, telah berkembang sedemikian rupa sehingga menciptakan ketergantungan dan resistensi terhadap perubahan. Dinasti Atma Wijaya yang telah berkuasa selama beberapa generasi berhasil membangun jaringan kekuasaan yang solid dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat loyal berperan dalam mempertahankan status quo. Akibatnya, kebijakan dan keputusan yang diambil cenderung menguntungkan keluarga yang berkuasa, sementara aspirasi dan kebutuhan masyarakat sering kali diabaikan. Kustoro menyatakan bahwa: "Pengaruh Atma Wijaya yang menjadi dukun dan lurah, dekat dengan bupati

pada saat itu, membuat semua keputusan diambil tanpa melibatkan masyarakat" (Wawancara Kustoro, 1 Desember 2024).

Institusi yang ada di Desa Sindangwangi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan pemerintahan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan dinasti dengan mengesampingkan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut Daryo sebagai mantan kepala desa menegaskan bahwa: "Kepemimpinan Atma Wijaya dari zaman Belanda mempunyai pengaruhnya yang masih terasa hingga kini" (Wawancara Daryo, 30 November 2024).

Institusi yang telah terbentuk selama bertahun-tahun tidak hanya sulit untuk diubah, tetapi juga terus memperkuat dominasi dinasti yang ada. Fenomena ini menggambarkan terjadinya *institutional lock-in* di mana struktur dan praktik yang sudah mapan menciptakan hambatan bagi perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, untuk mengatasi dominasi dinasti dan mengubah arah pembangunan desa yang lebih inklusif, diperlukan upaya signifikan untuk merombak institusi yang ada dan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dominasi dinasti Atma Wijaya di Desa Sindangwangi adalah hasil dari institusi politik yang telah berkembang secara historis dan menciptakan *path dependence*, yaitu pola kebijakan dan struktur kekuasaan yang terus direproduksi dari generasi ke generasi. Institusi bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi juga sistem nilai dan norma yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan serta siapa yang mendapat keuntungan dari sistem tersebut. Dalam kasus ini, institusi pemerintahan desa tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme yang memperkuat status quo dan menghambat perubahan politik. Pengaruh kepemimpinan Atma Wijaya yang telah berlangsung sejak era kolonial menunjukkan adanya *institutional lock-in*, suatu kondisi di mana struktur yang ada menjadi semakin sulit diubah karena sudah tertanam dalam budaya politik desa. Selain

itu, hubungan patronase yang diwariskan dari masa ke masa memperkuat dominasi dinasti dengan membatasi partisipasi masyarakat dan mengurangi transparansi pemerintahan. Dengan sistem yang sudah terinstitusionalisasi ini, setiap upaya reformasi atau perubahan menghadapi hambatan besar, karena kepentingan dinasti telah tertanam dalam struktur pemerintahan desa. Oleh karena itu, untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis, diperlukan reformasi institusional yang mampu mengubah struktur kekuasaan yang telah lama terkunci dalam dominasi satu keluarga.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan secara mendalam mengenai fenomena dinasti politik di Desa Sindangwangi, Kabupaten Brebes yang dilakukan oleh keluarga Atma Wijaya. Dinasti politik ini telah mendominasi kepemimpinan desa selama tiga generasi, mengindikasikan keberangkatan yang kuat dalam struktur kekuasaan lokal. Melalui analisis, terlihat jelas bahwa dinasti politik tersebut tidak hanya merepresentasikan kekuasaan yang terpusat dalam satu keluarga, tetapi juga mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik di tingkat desa secara keseluruhan. Proses terbentuknya dinasti politik ini dimulai dengan Atma Wijaya sebagai kepala desa pertama pada tahun 1933. Keterlibatan keluarga dalam politik desa berlanjut dengan mewariskan kekuasaan secara turun-temurun kepada anggota keluarga berikutnya. Melalui strategi politik yang cermat serta jaringan kekerabatan yang solid, keluarga Atma Wijaya berhasil mempertahankan dominasi mereka selama bertahun-tahun, bahkan menghadapi tantangan dari calon-calon lain dalam pemilihan kepala desa. Praktik dan jaringan kekuasaan ini membentuk sebuah ekosistem politik yang kuat, di mana ketergantungan masyarakat terhadap keluarga tersebut semakin mendalam.

Dampak dari keberadaan dinasti politik ini terhadap sistem demokrasi di Desa Sindangwangi sangat signifikan. Dominasi kekuasaan yang terpusat dalam satu keluarga berpotensi membatasi partisipasi politik masyarakat. Partisipasi yang seharusnya menjadi dasar dari proses demokrasi malah dapat tereduksi menjadi sekadar formalitas belaka. Dalam konteks ini, pemilihan kepala desa yang seharusnya bersifat demokratis menjadi lebih bersifat prosedural yang diarahkan oleh kekuatan keluarga, yang mengakibatkan masyarakat kurang berani untuk terlibat secara aktif dalam proses politik. Hal ini berimplikasi pada pengurangan otonomi desa dan munculnya praktik-praktik money politics yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, seperti korupsi, kolusi, dan

nepotisme, semakin memperburuk situasi di mana meskipun mekanisme demokrasi tetap diikuti, nilai esensial dari demokrasi dan otonomi desa semakin pudar. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada formalitas dalam proses pemilihan, keberadaan dinasti politik menciptakan ketidakadilan dalam partisipasi politik. Hal ini juga menimbulkan rasa apatis di kalangan masyarakat terhadap sistem politik, yang berakibat pada kepercayaan publik yang rendah terhadap pemerintah desa.

Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang dinamika kekuasaan lokal dan memberi kontribusi pada pemahaman fenomena dinasti politik di Indonesia. Selain menyoroti kelemahan-kelemahan dalam sistem demokrasi lokal, penelitian ini juga mengidentifikasi risiko-risiko yang ditimbulkan dari politik kekerabatan, yang dapat menggerogoti integritas dan kualitas pemerintahan desa, serta proses pembangunan yang lebih luas. Dengan demikian, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk mengkaji kembali pola-pola kepemimpinan yang ada dan memikirkan cara-cara untuk memperkuat partisipasi masyarakat serta mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh keberadaan dinasti politik.

Sebagai rekomendasi, perlu pertimbangan untuk meningkatkan partisipasi politik di tingkat desa melalui edukasi politik bagi masyarakat, yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang hak-hak mereka dan pentingnya keterlibatan dalam proses pemilihan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik KKN perlu diperkuat untuk memastikan bahwa proses demokrasi di Desa Sindangwangi tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga substantif, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut mengenai dampak dinasti politik di daerah lain, memberikan platform bagi penelitian ekstensif tentang dinamika politik lokal di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut adalah saran dari penulis:

1. Diharapkan masyarakat Desa Sindangwangi perlu meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman tentang hak-hak mereka dalam proses demokrasi. Pendidikan tentang proses demokrasi dan pemilihan kepala desa harus diperkuat.
2. Diharapkan masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum desa dan pengambilan keputusan lainnya. Suara mereka sangat penting dalam membentuk masa depan desa.
3. Masyarakat harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dari pemimpin desa. Masyarakat dapat bertanya dan meminta laporan tentang penggunaan anggaran dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
4. Masyarakat dianjurkan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan, termasuk perangkat desa dan tokoh masyarakat, guna memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan mereka didengarkan.
5. Diharapkan Aparat pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program desa.
6. Pemerintah desa perlu menginisiasi program-program pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu politik dan tanggung jawab mereka dalam berdemokrasi.
7. Aparat desa sebaiknya menjaga kemandirian dan netralitas dalam menjalankan tugas, serta menghindari terlibat dalam praktik KKN, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa tetap terjaga.
8. Aparat pemerintah desa perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program yang dijalankan, serta memperhatikan umpan balik dari masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2010). Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten. *Prisma*, 29(3), 102.
- Aminurosyah, J., Budiman, B., B, J., & Alaydrus, A. (2021). Demokrasi di Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Batu Timbau Kabupaten Kutai Timur). *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 92–109. <https://doi.org/10.54144/govsci.v2i2.23>
- Asriani, Karman, L. O. M., & Wawan. (2021). Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa. *Jurnal Sociopolitico*, 4(4), 1281–1286. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v4i1.58>
- Azzahra, F., & Sukri, I. F. (2022). Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi. *Jurnal APHTN-HAN*, 1(1), 105–119. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.27>
- Bagus, N., & Sasmito, C. (2021). Peranan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap. *Reformasi*, 11(2), 233–243.
- Beta, N. F. E. (2018). PATRONASE DAN KLIENTELISME DALAM FENOMENA PILKADES DENGAN CALON DARI SATU KELUARGA Studi Kasus Pilkades Serentak Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang Tahun 2017. In *UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG*. UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG.
- Bimantara, N. (2018). Analisis Politik Dinasti di Kabupaten Kediri. *Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan*, 7(4), 201–210. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21909>
- Creswell, J. W. (2015). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. In *Pustaka Pelajar* (3 ed.).
- Fadiyah, D., Dewi, R. K., & Karyana, A. (2022). Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan. *Journal of Political Issues*, 4(1), 19–

28. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.77>

Fathoni, M., & Rengu, S. P. (2015). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1), 139–146.

Fitriani, D., Budiyan, Y., Hardika, A. R., & Mita Choerunissa. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 362–371. <https://adshr.org/index.php/vo/article/view/43>

Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2>

Ismail, Y., & Junus, D. (2019). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa Bilato, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. *Journal of Governance Innovation*, 1(2), 17–36. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i2.354>

Karunia, A. F., & Sohrah. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLITIK DINASTI. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1), 249–260. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14044>

Kenawas, Y. C. (2015). The Rise of Political Dynasties in a Democratic Society. *Arryman Fellow Research Paper*, December, 1–58. <https://www.researchgate.net/publication/287736019>

Kurtz, D. V. (2018). Political anthropology: Power and paradigms. In *Political Anthropology: Power and Paradigms*. Westview Press. <https://doi.org/10.4324/9780429498268>

Lamangida, T., Akbar, M. F., & Hasan, H. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. *Publik :*

- (*Jurnal Ilmu Administrasi*), 6(1), 68. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.1.68-78.2017>
- Lestario, W. (2022). POLITIK DINASTI DALAM KEPEMIMPINAN DESA. *Jurnal Sociopolitico*, 2(i), 49–57.
- LÉVI-STRAUSS, C. (1969). The Elementary structures of kinship. In J. H. Bell, J.R. Von Strumer, & R. Needham (Ed.), *Social Anthropology and Human Origins* (Nomor July 1969). Beacon Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511974502.008>
- Mamik. (2018). Metodologi Kualitatif. In M. C. Anwar (Ed.), Zifatama Publisher (Nomor 1). Zifatama. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). Qualitative Data Analysis. In *CEUR Workshop Proceedings* (Second, Vol. 1304). SAGE Publications.
- Pratto, F., Stewart, A. L., & Zeineddine, F. B. (2013). When inequality fails: Power, group dominance, and societal change. *Journal of Social and Political Psychology*, 1(1), 132–160. <https://doi.org/10.5964/jspp.v1i1.97>
- Rahayu, V., & Hamidah, S. (2013). Peran Kekerabatan Terhadap Keterpilihan Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–20.
- Rahmadi. (2018). Pengantar Metodologi Penelitian. In Antasari Press. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Rahmadi. (2018). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Rizky, P. A. (2022). Pernikahan Politik Indonesia (Studi Kasus Pernikahan Adik

- Jokowi dan Ketua Mahkamah Konstitusi). *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(2), 104–113.
<https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.104-113>
- Romli, L. (2019). Demokratisasi Desa. In *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*.
- Romme, A. G. L. (1999). Domination, self-determination and circular organizing. *Organization Studies*, 20(5), 801–831.
<https://doi.org/10.1177/0170840699205005>
- Rusnaedi, Z. (2020). *Dinasti Politik di Aras Lokal* (1 ed.). Deepublish.
<https://id1lib.org/book/18023754/a5e972>
- Scott, J. (2007). Power, domination and stratification: Towards a conceptual synthesis. *Sociologia, Problemas e Praticas*, 55(September), 25–39.
- Siregar, M. T., Nasution, M. A., & Sihombing, M. (2021). Politik Dinasti Dalam Kepemimpinan Desa Mangaledang Lama Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. *Perspektif*, 10(2), 678–691.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5155>
- Steinmo, S. (2008). Historical institutionalism. Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, August 2008, 118–138.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511801938.008>
- Steinmo, S., Thelen, K., & Longstreth, F. (1992). Structuring Politics Historical Insritutionalism in Comparative Analysis. In *Structuring Politics*. The Press Syndicate Of The University Of Cambridge.
<https://doi.org/10.1017/cbo9780511528125>
- Suyadi. (2014). BENTUK DAN KARAKTER POLITIK DINASTI DI INDONESIA SKRIPSI [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. In *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*.
<https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/39127%0Ahttps://cris.brighto>

n.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4755978/Julius+Ojebode%27s+Thesis.pdf%0A
usir.salford.ac.uk/29369/1/Angela_Darvill_thesis_esubmission.pdf%0Ahttps:
//dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/ha

Tristana, R. W. (2017). DINASTI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN DESA
DI DESA KANCILAN KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA
(Analisi Implikasi Sosial dan Politik). *Journal of Politic and Government
Studies*, 6(3).

Ummah, S. M., Setiyawan, W. B. M., Suparwi, S., & Fatimah, S. (2023). Demokrasi
Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi.
Jurnal Usm Law Review, 6(3), 1223. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6818>

Violin, S. A., Hussain, M. A., Maharani, D. G. H., Putri, S. T. S., DJ, S. T. A., Farizi,
M. G. Al, Al Khafidhoh, L., & Dewi, R. (2024). Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Dalam Pilpres 2024 pada Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
Angkatan 2023. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*,
11(1), 25–36. <https://doi.org/10.24036/scs.v11i1.595>

Wendari, N., Daswati, & Tamher, F. W. (2021). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa
Di Kantor Desa Moahino Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali.
Cenderawasih, 1(1), 10–19.

Zuhriyati, E., Azis, B., & Putra, P. (2021). Local Political Dynasty of Saring Sungai
Binjai Village Kusan Hilir Sub-District, Tanah Bumbu Regency. *Journal of
Governance and Public Policy*, 8(2), 2549–7669.
<https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.12149>

LAMPIRAN

1. Lampiran Dokumentasi Penelitian

Gambar 6 Wawancara dengan mantan Kepala Desa Sindangwangi, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Brebes Bapak Sudono



Gambar 7 Wawancara dengan mantan Kepala Desa Sindangwangi periode 2014-2020 Bapak Daryo



Gambar 8 Wawancara dengan calon Kepala Desa Sindangwangi periode berikutnya, sekaligus adik dari Sudono, Bapak Rujo



Gambar 9 Wawancara dengan mantan Sekertaris Desa Sindangwangi Bapak Ramidi



Gambar 10 Wawancara dengan Kepala Dusun Ciheuleut Bapak Sutamto



Gambar 11 Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Sindangwangi Bapak Guru Darto dan Bapak Katijo





Gambar 13 Surat Izin Penelitian di Desa Sindangwangi

101

Gambar 14 Buku Profil Desa Sindangwangi 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ridwan Maulana
TTL : Brebes, 16 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan: WNI
Alamat : Dk. Ciheuleut RT/RW 03/08, Desa Sindangwangi, Kec.
Bantarkawung, Kab. Brebes
NIM : 2106016117
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Agama : Islam
Email : maulanaridwan092@gmail.com
No. HP : 082133717936

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 4 Sindangwangi	(2007-2013)
SMP Negeri 1 Bantarkawung	(2013 – 2016)
SMA Negeri 1 Bumiayu	(2016 – 2019)
UIN Walisongo Semarang	(2021-Sekarang)